05

SERI PENGAYAAN MATERI SEJARAH UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS

Islam, Dialog Toleransi, Kebangsaan

TUT WURI HANDAYANI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

ISLAM, DIALOG TOLERANSI, KEBANGSAAN

SERI PENGAYAAN MATERI SEJARAH UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
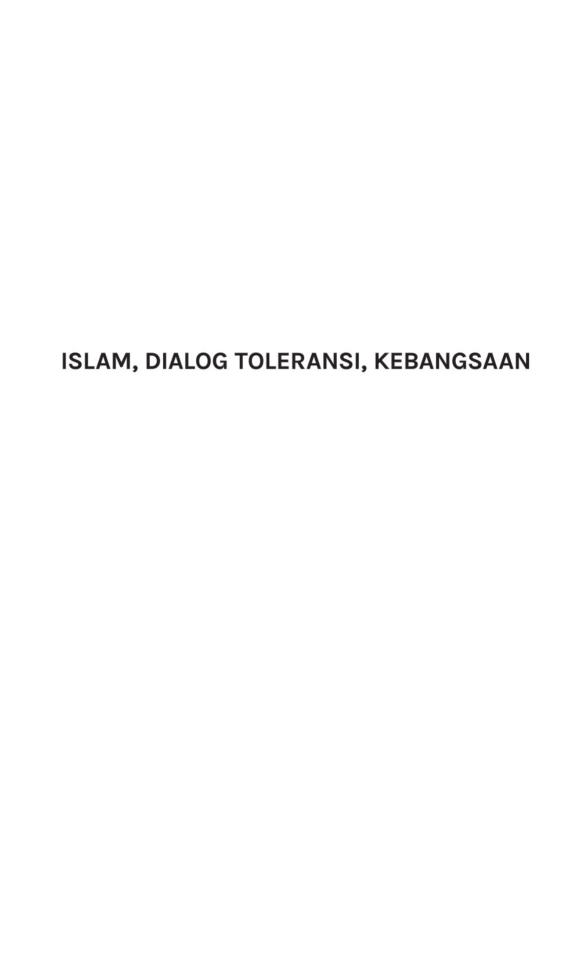
Islam, Dialog Toleransi, Kebangsaan

DIREKTORAT SEJARAH
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2018

ISLAM, DIALOG TOLERANSI, KEBANGSAAN

Penasihat Muhadjir Effendy
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Pengarah Hilmar Farid
Direktur Jenderal Kebudayaan

Penanggung Jawab Triana Wulandari
Direktur Sejarah

Penulis Yudi Amboro

Ilustrator Kendra Paramita

Desain Grafis Adityayoga | Carolline Mellanie

Editor Jajat Burhanudin | Kasijanto Sastrodinomo

Editor Visual Iwan Gunawan

Produksi dan Sekretariat Suharja | Tirmizi | Agus Hermanto | Bariyo | Dwi Artiningsih | Budi Harjo Sayoga | Esti Warastika | Dirga Fawakih | Oti Murdiyati Lestari | Krida Amalia Husna | Isti Sri Ulfiarti

Katalog Data Terbitan (Oleh Perpusnas)

Islam, Dialog Toleransi, Kebangsaan
17,5 x 25 cm
x + 108 halaman
cetak halaman isi 1/1

Penerbit
Direktorat Sejarah
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4-5,
Senayan, Jakarta 10270

Cetakan Pertama 2018

ISBN 978-602-1289-87-7

Catatan Ejaan

Seluruh teks dalam buku ini menggunakan ejaan umum bahasa Indonesia kecuali nama tokoh dan nama organisasi serta kutipan langsung yang tertulis dalam ejaan yang berbeda dipertahankan sesuai aslinya.

Sambut

Direktur Sejarah

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ekspresi Islam Indonesia menggambarkan ciri yang khas, yakni unsur-unsur yang menekankan pada harmoni dan silaturahmi atau kerukunan dan welas asih. Islam telah membuktikan keberhasilan dalam membumikan ajaran intinya dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Islam yang datang ke Indonesia membentuk sebuah perpaduan budaya yang khas dan berbeda dengan Islam di belahan dunia mana pun.

Buku ini berupaya mengangkat wajah khas Islam Indonesia yang di dalamnya terkandung banyak nilai kearifan. Nilai-nilai kearifan seperti sifat toleransi, inklusif (terbuka), dan silaturahmi, penting untuk terus ditumbuhkan di tengah krisis karakter generasi bangsa saat ini. Agar nilai-nilai kearifan tersebut dapat terserap dengan baik, kami berupaya menghadirkan bentuk penulisan sejarah interaktif yang menekankan pada visualisasi peristiwa, tokoh, tempat sejarah maupun ekspresi budaya. Dengan demikian, kami berharap generasi muda bangsa dapat mengambil hikmah dari nilai-nilai keislaman yang berpadu dengan budaya lokal Indonesia.

Buku ini terdiri dari lima jilid, meliputi tema-tema strategis dalam sejarah Islam di Indonesia. Dalam pertaliannya dengan keindonesiaan, tema-tema itu adalah (1) Islam dan kebudayaan, (2) Islam dan ekonomi, (3) Institusionalisasi Islam, (4) kaum ulama, dan (5) Islam dan kebangsaan.

Berbagai tema tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kepada generasi muda bahwa Islam dan keindonesiaan telah menjadi satu kesatuan yang saling mengkayakan. Di satu sisi Islam tetap terjaga akar kemurniannya, dan di sisi lain kebudayaan Nusantara semakin kaya dan berwarna dengan kehadiran Islam.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Kepada tim penulis dan ilustrator dari Institut Kesenian Jakarta yang telah bekerja keras dalam menyajikan materi dengan apik dan informatif. Kepada tim editor yang dengan segenap tenaga dan pikiran menelaah kata demi kata dan gambar demi gambar demi kedekatan naskah dengan kesempurnaan. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu, saya ucapkan selamat membaca, semoga kita dapat mengambil hikmah dan inspirasi dari buku ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Triana Wulandari

Gayung

Direktur Jenderal Kebudayaan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dalam arus sejarah Indonesia, Islam disebarkan oleh para penyiarnya dalam dakwah damai dengan pendekatan inklusif dan akomodatif terhadap kepercayaan dan budaya lokal. Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat sebagai sebuah agama yang membawa kedamaian, sekalipun saat itu masyarakat sudah memiliki sistem kepercayaan sendiri seperti animisme dan agama Hindu-Budha. Apa yang telah dilakukan oleh para Wali Sanga menjadi contoh betapa penyebaran Islam itu dilakukan secara damai tanpa adanya benturan dengan budaya lokal.

Islam yang berinteraksi dengan budaya lokal tersebut pada akhirnya membentuk suatu varian Islam yang khas, seperti Islam Jawa, Islam Madura, Islam Sasak, Islam Minang, Islam Sunda, dan seterusnya. Varian Islam tersebut adalah Islam yang tetap mempertahankan akar kemurniannya, namun di sisi lain telah berakulturasi dengan budaya lokal. Dengan demikian, Islam tetap tidak tercerabut dari akar kemurniannya, demikian pula sebaliknya budaya lokal tidak lantas hilang dengan masuknya Islam di dalamnya.

Varian Islam lokal tersebut terus lestari dan mengalami perkembangan di berbagai sisi. Islam kultural tetap menjadi ciri khas dari fenomena keislaman masyarakat Indonesia yang berbeda dengan Islam yang berada di Timur Tengah maupun di belahan dunia lain. Singgungan-singgungan dan silang budaya ini pada dasarnya telah membangun kebudayaan Islam yang ramah dan toleran. Interaksi antara Islam dan kebudayaan Indonesia dalam perjalanan sejarah merupakan sebuah keniscayaan. Islam memberikan warna pada kebudayaan Indonesia, sedangkan kebudayaan Indonesia memperkaya keislaman.

Saya menyambut baik penerbitan buku ini. Kehadiran buku ini penting dalam upaya menampilkan wajah Islam khas Indonesia yang ramah dan toleran. Dikemas dengan cara yang menarik, dengan berbagai visualisasi tokoh, peristiwa, tempat dan pernak-pernik kebudayaan, diharapkan buku ini dapat lebih dekat dengan generasi muda, sehingga nilai-nilai kearifan Islam khas Indonesia dapat diresapi dengan baik. Akhirnya saya ucapkan selamat membaca dan selamat menyelami kearifan budaya Islam khas Indonesia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Hilmar Farid

Amanat

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sejarah peradaban Islam Indonesia menampilkan ciri dan karakter yang khas, relatif berbeda dengan perkembangan peradaban Islam di wilayah-wilayah lainnya, seperti negara-negara di kawasan Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Penyebaran Islam di Indonesia dilakukan secara damai dengan pendekatan inklusif dan akomodatif terhadap kepercayaan dan budaya lokal. Sehingga membentuk suatu corak Islam khas Indonesia yang *wasatiyah* (moderat), *tasamuh* (toleran), ramah, inklusif, dan akomodatif terhadap kepercayaan dan budaya lokal. Kehadiran Islam di bumi Indonesia telah memperkaya kebudayaan Nusantara dengan memberikan warna baru bagi nilai-nilai budaya lokal yang telah terlebih dahulu berkembang.

Sejarah peradaban Islam tidak bisa dilepaskan dari aspek pembentukan bangsa Indonesia. Islam memberi kontribusi terhadap terbentuknya integrasi bangsa. Islam juga berperan sebagai pembentuk jaringan kolektif bangsa melalui ikatan ukhuwah dan silaturahmi para ulama di Nusantara. Jaringan ingatan dan pengalaman bersama ini pada akhirnya menumbuhkan rasa kesatuan dan solidaritas sehingga melahirkan perasaan sebangsa dan setanah air.

Perjalanan peran Islam di Indonesia penting untuk dijadikan sebuah pelajaran. Buku ini adalah sebuah ikhtiar dalam menampilkan perpaduan antara nilai-nilai Islam dan keindonesiaan yang berlangsung dalam arus sejarah Indonesia. Nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan yang telah membentuk identitas bangsa penting untuk terus dirawat, dijaga dan disemaikan kepada generasi penerus bangsa.

Saya menyambut baik penerbitan buku ini. Buku ini dapat menjadi sebuah alternatif dan wahana baru dalam menampilkan wajah Islam Indonesia yang ramah dan toleran. Dengan pengemasan dalam bentuk yang memikat secara visual, diharapkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan yang penting dalam upaya memperkuat karakter bangsa dapat terus lestari dan dapat diresapi dengan baik oleh generasi muda bangsa. Akhirnya saya mengucapkan selamat membaca dan selamat mengambil hikmah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Muhadjir Effendy

Ujar

Editor

Buku *Islam, Dialog Toleransi, Kebangsaan* ini menghadirkan pembahasan tentang dua poin penting yang terkait dengan sejumlah isu di sekitar keterlibatan kaum Muslim dalam proses pembentukan dan perkembangan Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa *(nation-state).*

Poin pertama, yang bersifat historis, membahas secara detail suatu proses sejarah ketika tokoh-tokoh Muslim mulai berbicara tentang Indonesia sebagai sebuah bangsa dan kemudian bergerak dalam rangka meraih kemerdekaan. Berawal dari mereka yang berafiliasi dengan, dan sekaligus elite dari organisasi pergerakan Islam (Sarekat Islam [SI], Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama [NU], Persatuan Islam [Persis], dan organisasi Islam yang menyusul berdiri di sejumlah daerah), tokoh-tokoh Muslim terlibat secara intensif dalam memberikan argumen Islam untuk memasuki satu era baru yang disebut pergerakan. Selain menyuarakan kemajuan bagi kaum Muslim, tokoh-tokoh Muslim mulai diskusi tentang isu antara lain Islam dan nasionalisme, dan juga ideologi lain yang berkembang di Tanah Air.

Proses diskusi ini terus berlanjut pada era menjelang kemerdekaan Indonesia. Didukung sikap politiknya yang "menghormati Islam", pemerintah pendudukan Jepang memberi ruang bagi tokoh Muslim Indonesia untuk duduk dalam kepanitiaan dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu, Islam tampil sebagai satu kekuatan politik melalui keterlibatan sejumlah tokohnya dalam proses-proses politik untuk perumusan Indonesia sebagai sebuah bangsa hingga pembangunan Indonesia modern. Dalam hal ini, satu hal penting untuk ditekankan adalah bahwa Islam telah memberi kontribusi sangat berarti dalam tahap-tahap penting proses Indonesia menjadi sebuah negara-bangsa, yang mengatasi berbagai entitas etnis, agama, kedaerahan, dan isu-isu primordial lainnya.

Poin kedua, yang lebih bersifat sosiologis, menjelaskan Islam dan kebangsaan dari inisiatif dan kontribusi signifikan tokoh-tokoh Muslim dalam menciptakan salah satu pilar penting dari kondisi kebangsaan, yakni kerukunan umat beragama. Dalam hal ini, sejumlah tokoh dibahas, terutama Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Nurcholish Madjid (Cak Nur), yang memang menjadi tokoh terdepan dalam menyuarakan kerukunan agama, toleransi dan pluralisme. Selain itu, sejumlah tradisi yang berkembang di masyarakat yang menjunjung tinggi kerukunan beragama (sebagai kebijaksanaan lokal), yang juga menjadi perhatian aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, juga menjadi satu subjek penting pembahasan buku ini.

Dengan semua pembahasan tersebut, kehadiran buku menambah khazanah pengetahuan kita tentang satu isu sangat sentral dalam kehidupan sosial-politik Indonesia, yakni kesediaan kaum Muslim hidup sebagai warga negara *(citizens)* dari negara-bangsa Indonesia, di atas ikatan-ikatan suku dan agama. Hal itu menjadi modal sangat berharga bagi konsolidasi demokrasi di negera kita tercinta ini.

Jajat Burhanudin
Kasijanto Sastrodinomo

DAFTAR ISI

MENGGAGAS KEBANGSAAN

SORE HARI ITU SEDANG BERLANGSUNG DISKUSI YANG CUKUP SERU DI TERAS RUMAH...

KAK, BENARKAH ORMAS KEAGAMAAN DI INDONESIA MEMILIKI PERAN DALAM MEMBANGUN KEBANGSAAN?

WAH TUMBEN KAMU TANYA-TANYA SOAL ORMAS KEAGAMAAN, NABILA..ADA APA NIH?

IYA KAK IQBAL, KEBETULAN NABILA DAPAT TUGAS PAPER TENTANG PERAN ORMAS KEAGAMAAN DALAM KEBANGSAAN DI SEKOLAH...

ITU LOH KAK, SEKARANG KITA KAN SERING DENGAR SOAL ORMAS KEAGAMAAN YANG MELAKUKAN UNJUK RASA SOAL POLITIK. MEMANGNYA APA SIH TUJUAN ORMAS-ORMAS KEAGAMAAN BERDIRI DI INDONESIA DAN MULAI KAPAN BERDIRINYA?

OH BEGITU.., BAIKLAH KAK IQBAL AKAN BANTU, TAPI BICARA SOAL ORMAS KEAGAMAAN ITU KAN LUAS, NABILA MAU MULAI DARI BAGIAN MANA?

PERTANYAAN NABILA AKAN KAK IQBAL JAWAB DALAM BERAPA BAGIAN YA....KARENA AKAN CUKUP PANJANG. KITA MULAI DARI MASA AWAL KETIKA ORMAS-ORMAS KEAGAMAAN MULAI BERDIRI DI INDONESIA, MASA KETIKA INDONESIA MASIH DIJAJAH DAN MASIH BERNAMA HINDIA BELANDA....

MASA KOLONIAL

1 SAREKAT ISLAM

Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan baru yang disebut Politik Etis yang mencakup desentralisasi, efisiensi, dan kesejahteraan rakyat, untuk menarik simpati rakyat. Tetapi secara umum, Politik Etis tetaplah sebuah upaya untuk melanggengkan kekuasaan Belanda di tanah jajahan melalui cara menarik simpati rakyat.

Salah satu efek dari Politik Etis adalah banyak ormas Islam di bidang agama, perdagangan, dan pendidikan mulai berdiri. Meski tidak secara langsung, ormas-ormas itu juga menjadi sarana penyadaran politik bagi terciptanya kalangan cerdik cendikia muslim yang baru. Beberapa ormas Islam yang muncul pada masa itu adalah Muhammadiyah, Sarekat Islam, Nahdlatul Ulama, Persis dan lain-lain.

Lambang Muhammadiyah

Lambang Sarekat Islam

Lambang Nahdlatul Ulama

Lambang Persis

Ilustrasi Putri Jogugu Gorontalo menyambut Gurbenur Jendral Belanda tahun 1900.

Organisasi Sarekat Islam. Sumber foto: KITLV.

Sarekat Islam didirikan pada 1905, ketika Raden Mas Tirto Adhie Suryo, pemilik surat kabar *Medan Prijaji*, mendirikan perkumpulan dagang di Bogor dengan nama Sarekat Dagang Islam (SDI). Secara terpisah, H. Samanhudi, seorang pedagang batik dari Laweyan Solo, mendirikan Rekso Roemekso, organisasi untuk mewadahi perdagangan muslim.

Pembuat batik.
Sumber foto: www.batik.or.id/sejarah_batik_solo

Mengetahui bahwa sudah berdiri SDI, H. Samanhudi meminta bantuan pendirinya Raden Mas Tirto Adhie Suryo agar mengubah Rekso Roemekso menjadi Sarekat Dagang Islam Solo pada akhir 1911. H. Samanhudi diangkat menjadi ketuanya.

Tujuan Sarekat Dagang Islam Solo adalah memperkuat kedudukan perdagangan muslim dalam menghadapi dominasi pedagang China. Pada 1912, Raden Mas Tirto Adhie Suryo pindah ke Surabaya dan bertemu dengan Raden Mas Haji Oemar Said Tjokroaminoto, seorang bangsawan terpelajar Indonesia yang menjadi pamong praja di sana. Atas saran Tjokroaminoto, pada 10 September 1912, Sarekat Dagang Islam diubah menjadi Sarekat Islam (SI). Alasan perubahan nama itu adalah agar jangkauan SI lebih luas, tidak terbatas pada kalangan pedagang saja. Dalam waktu singkat kenggotaan SI semakin bertambah sehingga menempatkan SI menjadi organisasi massa yang pertama di Indonesia.

H. SAMANHUDI
PENDIRI SAREKAT ISLAM

H.O.S. TJOKROAMINOTO
KETUA SAREKAT ISLAM

Gedung Sarekat Islam.
Sumber foto: Sjamsuddin Hamidy (Ketua Yayasan Balai Muslimin Semarang-1978).

Walaupun tujuan SI pada awalnya tidak bersifat politik, Pemerintah Kolonial tetap mengawasi kegiatan SI karena khawatir dimanfaatkan untuk memperjuangkan nasib rakyat. Izin pembentukan SI di tingkat pusat ditolak. Untuk meredam kecurigaan Pemerintah Kolonial pada kongres pertama SI di Surabaya (1913), Tjokroaminoto merasa perlu menerangkan bahwa SI bukanlah partai politik dan tidak bertujuan melawan pemerintah.

Potret bersama rapat Sarekat Islam di Kaliwungu.
Sumber foto: Tropen Museum.

Dalam kongres SI kedua di Solo, diputuskan bahwa keanggotaan SI hanya terbuka bagi rakyat biasa sedangkan pegawai pamong praja tidak boleh menjadi anggota. Hal itu bertujuan agar SI tetap menjadi organisasi rakyat. SI kemudian semakin berkembang. Tahun 1914 berdiri 56 cabang. Pada Februari 1915, pimpinan SI membentuk pengurus pusat yang disebut Central Sarekat Islam (CSI), berkedudukan di Surabaya, dengan ketua kehormatan H. Samanhudi, Tjokroaminoto dan Raden Gunawan sebagai wakil ketua. Pada 18 Maret 1916, CSI mendapat pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda. Beberapa tokoh SI kelak berperan penting dalam pergerakan nasional seperti Abdul Muis, Wignjodisastro, dan Soewardi Soerjaningrat. Ketiga orang ini merupakan pengurus SI Bandung. Tokoh penting lain yang bergabung dengan SI ialah K. H. Agus Salim.

H. O. S. Tjokroaminoto memimpin anggota Sarekat Islam.
Sumber foto: Adegan dari Film Guru Bangsa, Yayasan Keluarga Besar HOS Tjokroaminoto, Pick Lck Production

Guru bangsa Tjokroaminoto.
Sumber foto: Yayasan Keluarga Besar HOS Tjokroaminoto, Pick Lck Production

Memasuki tahun 1920 SI pecah menjadi dua. Pertama, SI yang berpaham Islam, dikenal dengan sebutan SI Putih atau golongan kanan. Kelompok ini dipimpin Tjokroaminoto, H. Agus Salim, dan Suryopranoto yang berpusat di Yogyakarta. Kedua, SI yang berpaham Marxisme atau komunisme dengan sebutan SI Merah atau golongan kiri. Kelompok ini dipimpin Semaun yang berpusat di Semarang. Dalam kongres keenam (1912), diberlakukannya tindakan disiplin organisasi yakni larangan bagi anggota SI (Putih) merangkap keanggotaan dalam SI Merah. Dengan demikian kelompok Semaun tersingkir dari SI. Pada 1923, kelompok Semaun secara resmi diakui sebagai cabang Partai Komunis Indonesia dengan nama Sarikat Rakyat.

Pada 1923, SI menyelenggarakan kongres nasional ketujuh di Madiun. Nama SI pada waktu itu diubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). Kemudian atas pengaruh dr. Sukiman yang baru pulang dari Belanda, PSI diubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Dalam perkembangannya PSII pecah menjadi dua kelompok yakni kelompok Sukiman yang menghendaki PSII menekankan pada asas kebangsaan, dan kelompok. Tjokroaminoto yang menekankan pada asas agama. Kelompok Sukiman mendirikan partai baru yakni Partai Islam Indonesia (PARII). Pada 1940, PSII pecah lagi dengan adanya PSII Kartosuwiryo.

2 MUHAMMADIYAH

Pada 1912, Muhammadiyah didirikan di Kauman, Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi itu bertujuan menjadi gerakan Islam modernis yang mempelopori pemurnian dan pembaruan Islam. Kata 'Muhammadiyah' sendiri berarti pengikut Nabi Muhammad.

Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah merupakan manifestasi gagasan pemikiran dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah kembali dari belajar di Tanah Suci pada 1903, K.H. Ahmad Dahlan mulai menyebarkan gagasan pembaruan di Tanah Air.

Gagasan pembaruan itu didapatkan K.H. Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama Indonesia yang bermukim di Makkah seperti Syeikh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Maskumambang; juga setelah membaca pemikiran para pembaru Islam seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha.

Interaksi dengan pemikiran yang diperoleh selama bermukim di Saudi Arabia dan bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam itulah yang membuat K.H. Ahmad Dahlan justru membawa ide dan gerakan pembaruan, bukan malah menjadi konservatif.

Mesjid Besar (Muhammadiyah Yogyakarta). Sumber foto: Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 200 tahun 1956.

Tokoh-tokoh Muhammadiyah tahun 1918.
Sumber foto: Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah.

Interaksi K. H. Ahmad Dahlan dengan kawan-kawan dari Boedi Oetomo (R. Budihardjo dan R. Sosrosugondo) juga menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi yang mengaktualisasikan gagasan Boedi Oetomo. Salah satunya menggunakan Muhammadiyah untuk mewadahi dan memayungi sekolah Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, yang didirikan pada 1 Desember 1911. Sekolah tersebut merupakan lanjutan dari "sekolah" yang dikembangkan K. H. Ahmad Dahlan secara informal dalam pendidikan agama Islam dan pengetahuan umum yang dilakukan di rumahnya. Tidak seperti umumnya suatu sekolah agama saat itu yang diselenggarakan di surau, sekolah K. H. Ahmad Dahlan bertempat di dalam sebuah gedung dengan menggunakan meja dan papan tulis.

Anggaran Dasar Muhammadiyah diajukan pada 20 Desember 1912, disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Tujuan Muhammadiyah:

1. ***MEMBERSIHKAN ISLAM DI INDONESIA DARI PENGARUH DAN KEBIASAAN YANG BUKAN ISLAM,***
2. ***REFORMULASI DOKTRIN ISLAM DENGAN PANDANGAN ALAM PIKIRAN MODERN,***
3. ***REFORMULASI AJARAN DAN PENDIDIKAN ISLAM,***
4. ***MEMPERTAHANKAN ISLAM DARI PENGARUH DAN SERANGAN LUAR.***

His met de Quran van Muhammadiyah Purbalinggo 1925.
Sumber foto: Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah.

Mesjid Besar (Muhammadiyah Yogyakarta). Sumber foto: Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 200 tahun 1956.
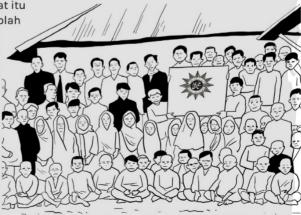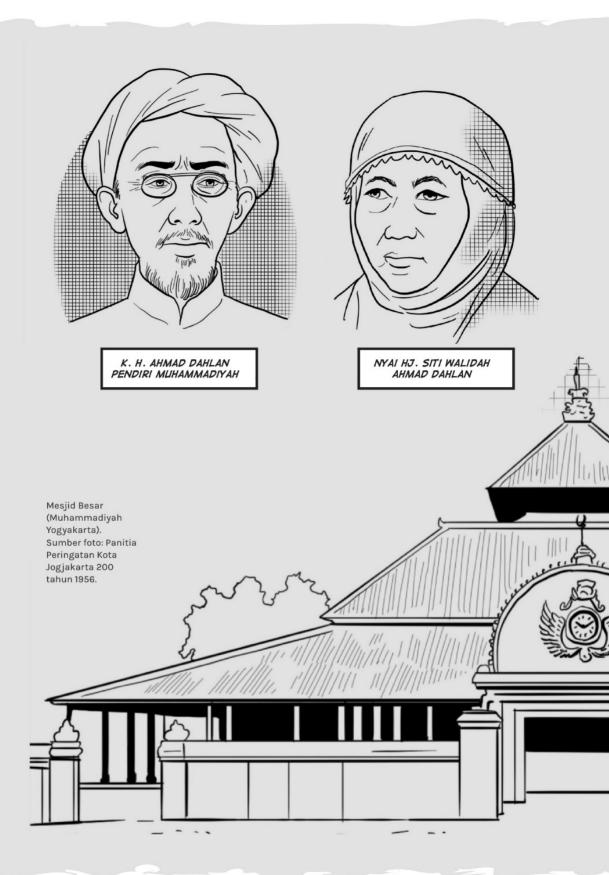
Langkah pembaruan Muhammadiyah dalam merintis pendidikan modern adalah memadukan pelajaran agama dan pelajaran umum. Tujuannya untuk menghasilkan generasi muslim terpelajar yang mampu hidup di zaman modern. Lembaga pendidikan Islam modern kemudian menjadi ciri utama Muhammadiyah yang membedakannya dari lembaga pondok pesantren kala itu. Pendidikan Islam modern inilah yang kemudian diadopsi menjadi lembaga pendidikan umat Islam secara umum.

K. H. Ahmad Dahlan juga membuka diskusi agama dengan pemuka agama lain di sekitar Yogyakarta. Ia menganjurkan dan mendorong umat Islam mengkaji semua agama secara rasional. Diskusi-diskusi tentang agama lain boleh dilakukan di masjid.

atas
Bestuur Taman Pustaka Muhammadiyah 1922.
Sumber foto: mpi. muhammadiyah.or.id

bawah
K. H. Ahmad Dahlan.
Sumber foto:
Adegan dari Fiml Sang Pencerah MVP Pictures 2010.
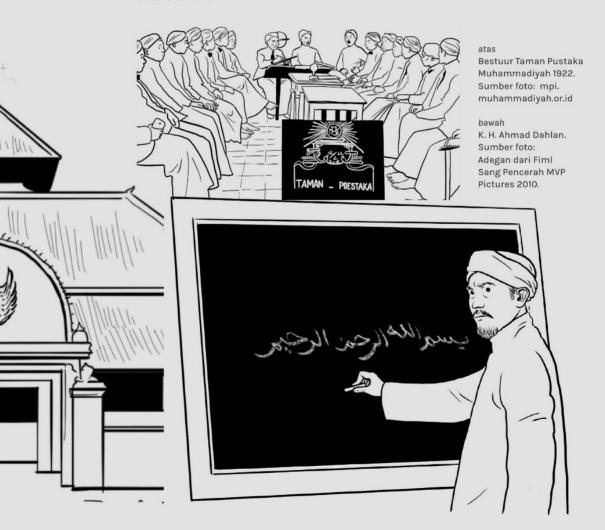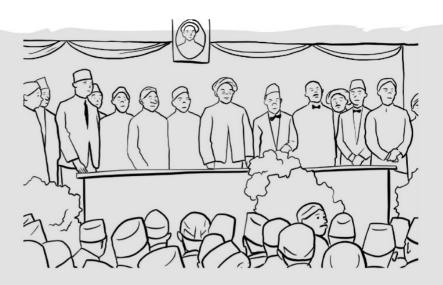
Suasana Kongres Muhammadiyah. Sumber foto: www.republika.co.id

Kepeloporan pembaruan K. H. Ahmad Dahlan juga ditunjukkan dengan merintis gerakan Aisyiyah pada 1917. Ide dasarnya adalah bahwa kaum muslimah tidak hanya berada di rumah, tetapi harus giat dalam masyarakat serta memajukan kehidupan kaum perempuan. Hal itu menunjukkan sikap dan visi Islam yang luas dari K.H. Ahmad Dahlan mengenai posisi dan peran perempuan.

Fenomena yang paling menonjol dari kehadiran Muhammadiyah ialah bahwa gerakan Islam yang murni dan berkemajuan dihadirkan bukan lewat jalur perorangan, tetapi melalui sebuah sistem organisasi. Menghadirkan gerakan Islam melalui organisasi merupakan terobosan karena saat itu umat Islam masih dibingkai oleh kultur tradisional yang lebih mengandalkan kelompok-kelompok lokal seperti lembaga pesantren dengan peran kiai yang sangat dominan selaku pemimpin informal.

K. H. Ahmad Dahlan juga membentuk lembaga Penolong Kesengsaraan Oemoem yang terlibat dalam memecahkan masalah-masalah nyata yang dihadapi masyarakat.

Hj. Siti Walidah Ahmad Dahlan. Sumber foto: Adegan dari FIlm Sang Pencerah MVP PIctures 2010.

3 NAHDLATUL ULAMA (NU)

Nahdlatul Ulama (NU), yang berarti "kebangkitan ulama", adalah organisasi yang didirikan oleh para ulama di kota Surabaya pada 1926. Kehadirannya sangat berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam waktu itu.

Pada 1924, terjadi pergantian penguasa di kawasan Arab. Penguasa lama, Syarif Husein, Raja Hijaz (Makkah) yang berpaham Sunni ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang bermazhab Wahabi. Selain memakan korban ulama Jawi yang berada di Makkah saat itu, perang juga memunculkan berita bahwa penguasa baru akan melarang bentuk amaliah keagamaan yang sudah berjalan dan akan menggantinya dengan model Wahabi, termasuk sistem bermadzhab, ziarah kubur, tawasul, maulid nabi dan sebagainya.

Peristiwa itu menjadi salah satu titik puncak perbedaan pandangan antara kaum reformis dan kaum tradisionalis Islam baik di kawasan Arab maupun di Indonesia. Semangat kaum reformis yang berasal dari generasi muda dan tergabung dalam ormas Islam modern dalam menentang praktik-praktik dan ritual dalam Islam yang dianggap 'tak Islami' semakin mendapatkan momentum. Sementara di sisi lain penolakan kaum tradisionalis yang berasal dari generasi tua dengan latar belakang pesantren terhadap kekakuan sikap reformis pada tradisi yang telah ada dalam Islam di Indonesia juga semakin besar yang menyadarkan para ulama akan pentingnya sebuah organisasi.

Santri pejuang.
Sumber foto: Adegan dari FIlm Sang Kiai Rapi Film 2013.

K. H. ABDUL WAHAB CHASBULLAH

KIAI HAJI HASYIM ASY'ARI

Setelah serangkaian Kongres Al-Islam yang diadakan oleh Sarekat Islam dengan tujuan mempersatukan semua golongan Muslim Indonesia, kelompok tradisionalis dari Jawa Tengah dan Jawa Timur membentuk Komite Hijaz yang pada 1926 menjadi organisasi permanen dengan nama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama).

Kekuatan pendorong di balik NU yang baru dibentuk adalah rais akbar pertamanya, Hasyim Asy'ari dan muridnya Abdul Wahab Chasbullah yang menjadi sekretaris (katib) Syuriah (Dewan Penasihat). Kiai Hasyim Asy'ari adalah pendiri Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur pada 1899. Sedangkan Wahab Chasbullah adalah murid Ahmad Khatib di Makkah, seorang penganjur reformasi pendidikan dan pendukung *ijtihad* untuk menjamin hukum Islam tetap sejalan dengan kondisi sosial.

Pendiri Madrasah Nahdlatul Wathan (Sekolah Kebangkitan Tanah Air), koperasi dagang pedagang Muslim di Jombang yang bernama Nahdlatul Tujar (Kebangkitan Pedagang), membentuk kelompok diskusi bernama Taswirul Afkar.

Kantor PCNU Surabaya.
Sumber foto: Achmad Al_Mujahir_PCNU Surabaya2017

Selanjutnya kelembagaan dan organisasi NU berkembang dengan penerbitan jurnal membuka cabang di berbagai bagian Nusantara dengan fokus di daerah Jawa dan Madura.

Lima belas ulama perumus Khittah NU 1926 memasukkan pernyataan tersurat bahwa NU menganut doktrin-doktrin *Ahlussunnah Wal-Jama'ah*, dan dasar paham keagamaannya pada empat sumber, yaitu Alquran, *As-Sunnah, Ijma'* (kesepakatan para sahabat dan ulama) dan *Qiyas* (analogi).

Dalam menafsirkan dan memahami arti Islam, NU mengikuti paham *Ahlussunnah Waljamaah* dan menggunakan mazhab atau jalan pendekatan berdasarkan tiga bidang, antara lain:

1. Bidang *fiqih*, NU mengikuti paham Ahlussunnah Waljamaah yang dipelopori oleh Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah an-Nu`man, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Muhammad bin Idris as-Syafi`i.
2. Bidang *aqidah*, NU mengikuti paham Ahlussunah Waljamaah yang dipelopori oleh Imam Abu Mansur Al Maturidi dan Imam Abul Hasan al-Asy`ari.
3. Sedangkan dalam bidang tasawuf, NU mengikuti madzab Imam al-Ghozali, Imam Junaid al-Baghdad serta imam-imam lain.
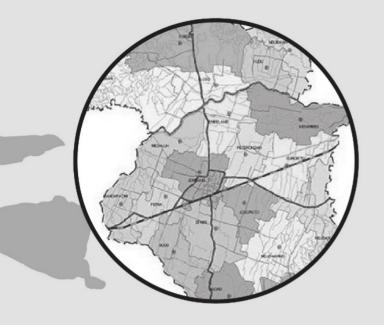
NU berpendirian bahwa Islam adalah agama fitri yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia.

Doktrinal penting NU adalah mengakui dimensi budaya dalam Islam tradisionalis Indonesia. Apa yang dilakukan NU serupa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga yaitu menunjukkan toleransi luas atas adat lokal dan mencoba mengakomodasi atau menghidupkan kembali budaya setempat.

K. H. Abdul Wahab Chasbullah (berdiri).
Sumber foto: www.nu.or.id

4 PERSATUAN ISLAM

Mohammad Natsir.
Sumber foto:
www. jawapos.com

Persatuan Islam (disingkat Persis) adalah organisasi Islam di Indonesia yang didirikan pada 12 September 1923 di Bandung, oleh kelompok saudagar keturunan Palembang yang sudah lama menetap di Jawa Barat, dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus.

Persis bukan organisasi keagamaan yang berorientasi politik, namun lebih fokus terhadap pendidikan Islam dan dakwah dan berusaha menegakkan ajaran Islam secara utuh tanpa dicampuri khurafat, syirik, dan bid'ah yang saat itu telah banyak menyebar di kalangan awam Islam.

Baru pada 1926 Persis mulai memegang prinsip-prinsip modernis. Salah satu tokohnya yaitu Ahmad Hassan (1887-1958), seorang keturunan Tamil kelahiran Singapura yang pindah ke Jawa untuk mendirikan bisnis tekstil. Ahmad Hassan belajar ilmu-ilmu Islam dan kemudian menjadi ideolog utama Persis.

Dibanding ormas Islam lain, Persis tetap sangat kecil karena memusatkan perhatian menciptakan kelompok "kecil dan longgar" yang menanamkan *esprit de corps.*

Ahmad Hassan kedua dari kiri. Sumber foto: tirto.id/si-raja-debat-yang-gigih-membela-Islam-CgGY

Aktivis terkemuka Persis juga terlibat di dalam organisasi Muslim lain, misalnya Sabirin yang memegang jabatan penting di Sarekat Islam juga Mohammad Natsir yang menjadi salah seorang pemimpin Jong Islameten Bond. Persis juga mengembangkan organisasinya dan menambahkan sayap perempuan dan pemuda, kemudian pada Konferensi Persis 1936 semua diintegrasikan menjadi lebih terstruktur.

M. Natsir bersama alm. A. Hasan diabadikan bersama rekan - rekannya di rumah H. Tamim di Jl. Tamim Bandung. Sumber foto: www.jejakIslam.net

Kantor Pimpinan Pusat Persis. Sumber foto: www. suaranasional.com

Mohammad Natsir setelah Masyumi mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), sumber foto: www. republika.co.id
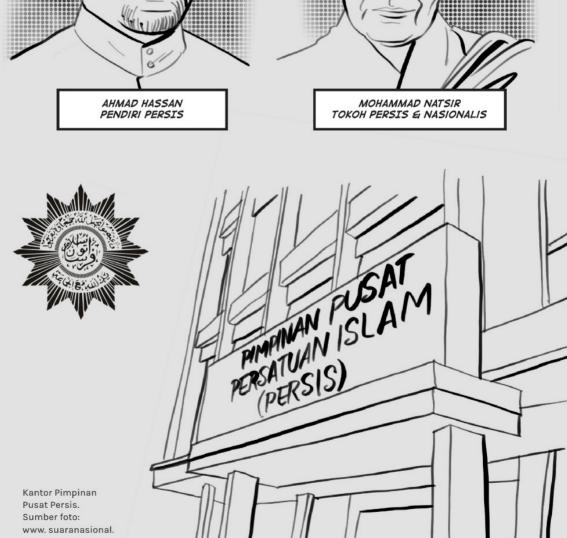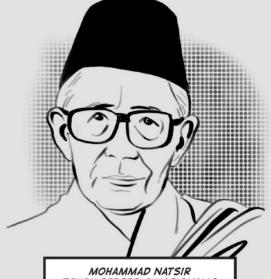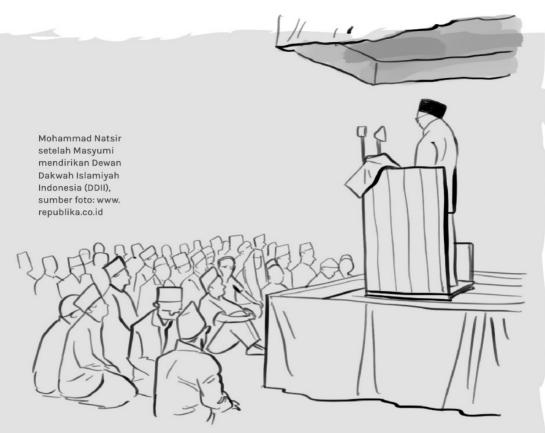
Di bidang pendidikan Persis mendirikan sekolah dasar berbahasa Belanda (Hollands-Inlandsche School) dan sekolah menengah pertama (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, MULO) yang sebagian anggarannya berasal dari negara. Persis belakangan juga membuka sekolah guru (Kweekschool) di Bandung, hingga pada 1918 Persis sudah memiliki sekolah di lima lokasi lain di Jawa.

Pada 1936, Persis memperkenalkan format pendidikan berbeda dengan membuka pesantren yang fokus utamanya adalah pendidikan agama. Pesantren Persis dipimpin Ahmad Hassan, sementara Mohammad Natsir menjadi guru utama di sana.

Pesantren Persis.
Sumber foto: www. youtube.com

Pada 1929, Persis menjadi inisiator pembentukan Komite Pembela Islam di Bandung dan menerbitkan Koran Pembela Islam yang beredar di kalangan Islam modernis di Jawa, Minangkabau, Kalimantan, Sulawesi Selatan, hingga Thailand Selatan.

Terbitan Persis lainnya adalah majalah beraksara Jawi, *Al-Fatwa*, yang membahas masalah hukum dan Al-Lisan. Persis cabang Bandung juga menerbitkan majalah berbahasa Sunda *Al-Taqwa* yang isinya sebagian besar terjemahan artikel *Pembela Islam* dan *Al-Fatwa*. Persis juga menerbitkan gagasan dan pemikiran dalam bentuk buku mengenai perkara doktrinal, hukum dan fikih, Alquran, sejarah Islam, organisasi dan tujuan Persis, juga politik—khususnya Islam dan nasionalisme.

5 PEMIKIRAN KAUM MUDA ISLAM LINTAS TOKOH DAERAH

AHMAD SURKATI

Ahmad Surkati lahir di Sudan, pada 1875. Setelah belajar di Al-Azhar dan Mekah, Surkati kemudian datang ke Jawa pada Maret 1911, atas permintaan Jami'at Khair, organisasi warga keturunan Arab di Jakarta, untuk mengajar. Kemudian ia mendirikan madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah pada 6 September 1914, sekaligus Perhimpunan Al-Irsyad, yang bertujuan memurnikan Islam, melalui bidang pendidikan dan kemasyarakatan.

Sejarawan Belanda G.F. Pijper memandang Sukarti sebagai tokoh reformis pergerakan Islam di Indonesia. Sukarno bahkan menyebut Surkati ikut mempercepat lahirnya kemerdekaan Indonesia. Ahmad Surkati wafat pada 6 September 1943.

AHMAD HASAN

Ahmad Hasan, kelahiran Singapura pada 1887, populer di kalangan kaum muda progresif yang ada di Persis. Bersama dengan Mohammad Natsir, Hasan menerbitkan majalah *Pembela Islam* dan *Al-Lisan*. Ia juga mendirikan pesantren untuk membentuk kader muda Persis.

Ahmad Hasan dikenal sebagai ulama pembaru karena pemikirannya yang tajam dan kritis dalam memahami nash (teks) Alquran maupun hadis dan juga produktif menulis. Keahliannya dalam bidang hadis, tafsir, fikih, ushul fikih, ilmu kalam, dan mantiq, menjadikannya sebagai rujukan bagi pemerhati kajian Islam. Ia meninggal dunia pada 10 November 1958 dalam usia 71 tahun.

BUNG HATTA

Mohammad Hatta lahir di Bukittinggi, 12 Agustus 1902 dari keluarga ulama Minangkabau, Sumatera Barat. Setelah menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu, Bukittinggi, Hatta kemudian melanjutkan studi ilmu perdagangan di Nederland Handelshogeschool

Hatta memulai aktivitas politiknya dalam organisasi, Jong Sumateranen Bond Cabang Padang. Di sana Hatta mulai mengenal pemikiran Tjokroaminoto dari surat kabar *Utusan Hindia*, dan tulisan Agus Salim dalam *Neratja*. Hatta kemudian aktif di Indonesische Vereeniging (1922). Pada tahun 1945, Hatta bersama Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Bung Hatta diakui semua kalangan sebagai sosok Muslim yang sangat teguh menjalankan syariat Islam tanpa harus dipamerkan kepada publik. Bung Hatta wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun.

BUYA HAMKA

H. Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka adalah seorang ulama internasional, pejuang, dan sastrawan. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi, menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama, dan aktif dalam Muhammadiyah. Selain mendapat anugerah gelar doktor kehormatan Buya Hamka dikukuhkan sebagai guru besar. Namanya kemudian disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah.

Hamka belajar ke Makkah. Untuk mendalami sejarah Islam dan sastra. Ketika kembali ke Tanah Air, Hamka merintis karier sebagai wartawan sambil bekerja sebagai guru agama sementara waktu di Medan. Pada 1936, ia menerbitkan majalah *Pedoman Masyarakat*. Karya lainnya, *Di Bawah Lindungan Ka'bah* dan *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*, melambungkan namanya sebagai sastrawan.

Tuduhan melakukan gerakan subversif membuat Hamka dipenjara pada 1964. Di tahanan ia merampungkan Tafsir Al-Azhar. Seiring peralihan kekuasaan, ia dibebaskan pada Januari 1966. Hamka meninggal pada 24 Juli 1981.

H. AGUS SALIM

H. Agus Salim lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884 dengan nama Mashudul Haq. Karena ayahnya seorang jaksa, Agus Salim dapat belajar di sekolah Belanda. Dalam usia muda, dia telah menguasai sedikitnya tujuh bahasa asing; Belanda, Inggris, Arab, Turki, Perancis, Jepang, dan Jerman. Pada 1903 dia lulus dari HBS *(Hogere Burger School)* dengan predikat lulusan terbaik.

Agus Salim menjadi penerjemah di konsulat Belanda di kota Jedah, Arab Saudi antara 1906-1911. Di sana ia sekaligus memperdalam ilmu agama Islam pada Syech Ahmad Khatib (imam Masjidil Haram), mempelajari diplomasi dan jurnalistik. Sepulang dari Jedah, Agus Salim mendirikan sekolah HIS (Hollandsche Inlandsche School), dan kemudian masuk dunia pergerakan nasional.

Karier politik Agus Salim berawal di SI, bersama H. O. S. Tjokroaminoto dan Abdul Muis pada 1915. Agus Salim menggantikan posisi Tjokroaminoto sebagai ketua setelah pendiri SI itu meninggal dunia pada 1934.

Selain menjadi tokoh SI, Agus Salim juga merupakan salah satu pendiri *Jong Islamieten Bond* dan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ketika Indonesia merdeka, ia diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung.

Kepiawaiannya berdiplomasi membuat ia dipercaya sebagai Menteri Muda Luar Negeri dalam Kabinet Syahrir I dan II serta menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta. Sesudah pengakuan kedaulatan, Agus Salim ditunjuk sebagai penasihat Menteri Luar Negeri. Sebagai diplomat Agus Salim dikenal dengan julukan *The Grand Old Man*, bentuk pengakuan atas prestasinya di bidang diplomasi. Agus Salim wafat pada 4 November 1954 dalam usia 70 tahun.

MASA PENDUDUKAN JEPANG

Ilustrasi invansi Jepang di Kalimantan.
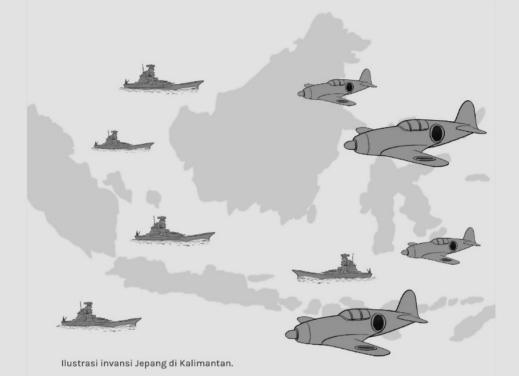
Tentara PETA. Sumber foto: https://tirto.id

Invansi Jepang di Indonesia dimulai dengan menguasai wilayah Kalimantan dan Jawa, hingga akhirnya Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Jepang. Ketika berhasil menduduki Indonesia (1942-1945), Jepang membuat kebijakan yang berbeda dibanding Belanda. Pemerintahan Jepang mengakomodasi dua kekuatan besar di Indonesia pada waktu itu, yaitu kaum Islam dan nasionalis sekuler.

Jepang memahami bahwa Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, jadi jika ingin berhasil maka Jepang harus mengakomodasi kekuatan tersebut dan melakukan kerja sama dengan para ulama yang memiliki pengaruh yang besar di kalangan masyarakat. Jepang kemudian banyak membentuk organisasi-organisasi untuk mewadahi ulama.

Gedung MIAI.
Sumber foto:
www.republika.co.id
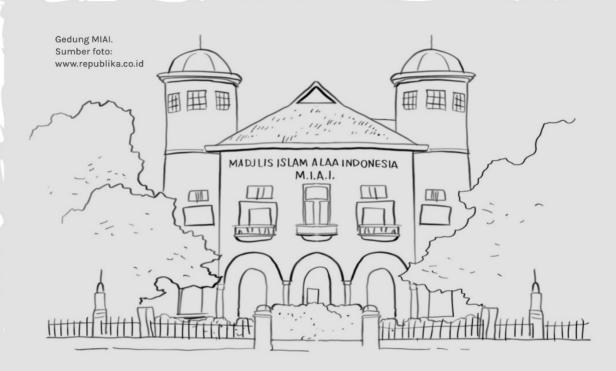
1 *MAJELIS ISLAM ALA INDONESIA*

Salah satu organisasi yang menonjol karena kebijakan Jepang adalah Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI) yang didirikan pada 1937 berdasarkan pertemuan pada 18-21 September di Surabaya. Pemimpin MIAI pertama adalah K. H. Mas Mansyur, Wondoamiseno, dengan K. H. Hasyim Asy'ari sebagai pencetusnya.

MIAI tetap dibiarkan berkembang oleh Jepang karena golongan Islam dinilai paling anti barat dan hanya bergerak pada bidang amal. Bahkan Jepang juga ikut membantu MIAI dalam bentuk memberikan zakat dan mendirikan masjid. Selanjutnya MIAI berkembang menjadi organisasi besar yang mendapat simpati dari seluruh umat Islam Indonesia. KH Hasyim Asy'ari menjadi ketua badan legislatif dengan 13 organisasi yang tergabung dalam MIAI sehingga Jepang mulai mengawasi kegiatannya. MIAI secara resmi dibubarkan Pemerintah Jepang pada akhir Oktober 194[illegible]
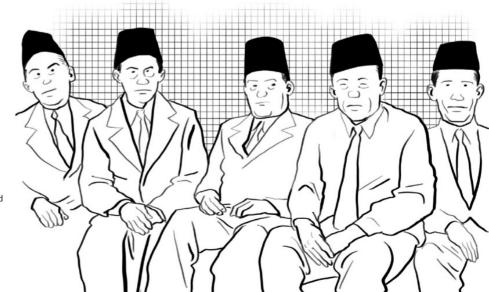
Pimpinan harian Dewan MIAI.
Sumber foto:
www.brainly.co.id

DR. HOESEIN DJAJADININGRAT

2 SHUMUBU

Organisasi lain yang muncul pada masa penjajahan Jepang adalah Shumubu yang didirikan akhir Maret 1942 di Jakarta. Shumubu berfungsi lebih kurang seperti kantor urusan pribumi pada masa Belanda.

Awalnya Shumubu dipimpin langsung oleh seorang perwira tentara Jepang , yakni Kolonel Horie. Kemudian Jepang mengangkat ketua baru Shumubu pada Oktober 1943, Dr. Hoesein Djajadiningrat, priayi yang pernah bekerja sebagai asisten penasihat masalah pribumi untuk pemerintahan kolonial Belanda. Namun ternyata juga gagal dalam menggerakkan massa karena tidak diterima oleh kalangan umat di pedesaan.

Akhirnya Jepang mengangkat K. H. Hasyim Asy'ari, ulama yang dianggap mempunyai pengaruh besar, sebagai Ketua Shumubu. Dalam perkembangannya, Shumubu juga menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan fungsi Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan, Pendidikan, dan Keagamaan Umum.

"HIDUP MULIA ATAU MATI SYAHID."

3 LASKAR HIZBULLAH

Selain dibentuknya ormas Islam, keuntungan lain dari pendudukan Jepang bagi umat Islam adalah terbukanya kesempatan membentuk laskar *Hizbullah* pada akhir 1944. *Hizbullah* adalah semacam kesatuan militer bagi pemuda-pemuda muslim. Melalui *Hizbullah* Jepang berharap agar propaganda tentang "perang suci" mendapat dukungan dari pemuda-pemuda Islam. Melalui *Hizbullah*, para pemuda diberikan latihan kemiliteran. Menurut

Awalnya semboyan keagamaan yang sangat populer pada waktu itu sebagai propaganda *Hizbullah*, menurut Masjkur, ialah "hidup mulia atau mati syahid". Semboyan semacam ini semakin membakar semangat pemuda Islam untuk bergabung dalam Laskar *Hizbullah*. Di samping *Hizbullah*, dibentuk pula barisan *Sabilillah*, yaitu pasukan militer bagi para ulama. Dalam hirarkinya, *Sabilillah* merupakan induk atau pengayom *Hizbullah*.

Laskar Hizbullah.
Sumber foto:
www.nu.or.id
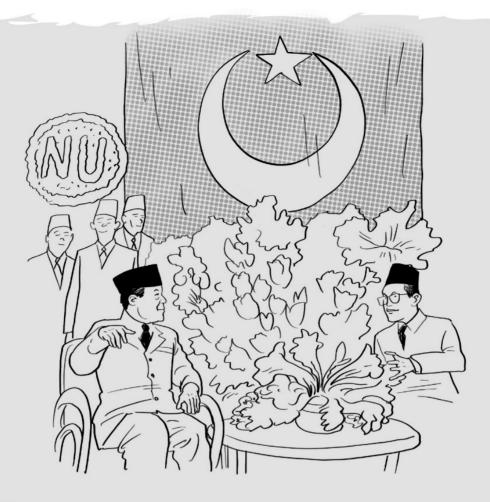
4 MASYUMI

Politik penjajah Jepang menganggap Islam sebagai kekuatan yang berguna untuk mendukung Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Salah satu tonggak penting bagi masa depan politik Islam adalah didirikannya Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), yang menjadi lembaga politik, dan ikut memperbesar pengaruh anggota-anggotanya, termasuk NU dan Muhammadiyah.

Pada pengujung Perang Dunia II, aktivis muslim mulai terlibat dalam serangkaian inisiatif untuk persiapan kemerdekaan. Salah satu inisiatif tersebut adalah pembentukan Panitia Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Wakil-wakil Masyumi ikut serta menyiapkan umat Islam untuk perjuangan kemerdekaan negara dan agama. Penyebutan agama penting karena bagi para politikus Muslim, kemerdekaan Indonesia tetap terikat erat dengan agenda pendirian negara Islam, sementara kelompok nasionalis sekuler (termasuk politikus berlatar belakang Islam) lebih mengkampanyekan negara kesatuan yang tidak melibatkan agama dalam proses politik. Kaum nasionalis sekuler mengambil contoh dari perkembangan demokrasi di Turki, sementara para pemimpin muslim mengambil contoh dari perkembangan di India dan kelahiran Pakistan.

KAK, APA SAJA PERAN KALANGAN MUSLIM PADA SAAT PERJUANGAN KEMERDEKAAN?
BISA DIBILANG KALANGAN MUSLIM INDONESIALAH YANG MENJADI MOTOR UTAMA PERJUANGAN PADA DETIK-DETIK KEMERDEKAAN.
DISKUSI NABILA DAN IQBAL TERUS BERLANJUT HINGGA KE TOPIK PERJUANGAN KEMERDEKAAN...
APA SAJA YANG TERJADI SAAT ITU, KAK? NABILA DENGAR TIDAK SEMUANYA BERJALAN DENGAN MULUS DAN LANCAR YA, KAK?
TENTU SAJA TIDAK DALAM PERJUANGAN APALAGI YANG MELIBATKAN BANYAK ELEMEN, PASTILAH TERJADI PERDEBATAN DAN PERBEDAAN PENDAPAT. APALAGI SEBAGIAN BESAR TOKOH-TOKOH KITA SAAT ITU MASIH BERUSIA MUDA
NAH, TAPI BAGAIMANA CARA TOKOH-TOKOH ISLAM SAAT ITU DAPAT MENYATUKAN PENDAPATNYA DAN MEWUJUDKAN NEGARA KITA MENJADI NEGARA KESATUAN SEPERTI SEKARANG INI, KAK?
TERWUJUDNYA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA INI TIDAK TERLEPAS DARI SIKAP KENEGARAWANAN TOKOH-TOKOH TERSEBUT. TERUTAMA TOKOH MUSLIM YANG MAU MEMPERTEMUKAN VISI DAN MISI AKAN KEMERDEKAAN DI DALAM SEBUAH NEGARA KESATUAN YANG MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI PERSATUAN DALAM KERAGAMAN DAN TIDAK SEGAN-SEGAN MENGORBANKAN JIWA DAN RAGANYA DEMI TERWUJUDNYA CITA-CITA TERSEBUT.

MASA PERJUANGAN KEMERDEKAAN

Pertemuan Taiping, ki-ka: Prof. Akamatsu Kaname, Dr. Hatta, Radjiman Widiodiningrat, Sukarno, Ibrahim Yacob, Prof. Hagaki. Sumber foto: Prof. Hagaki.

1 TOKOH ISLAM DALAM PERSIAPAN KEMERDEKAAN

Keterlibatan tokoh-tokoh politik Islam dalam persiapan kemerdekaan Indonesia terlihat dalam pembentukan BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai.*

BPUPKI ini diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat. Menurut Prawoto Mangkusasmito, dari 68 orang anggota BPUPKI, 15 orang merupakan tokoh Islam. Di antaranya adalah, A. Sanusi (PUI), Bagus Hadikusumo, Mas Mansur, Abdul Kahar Muzakir (Muhammadiyah), Wahid Hasyim, Masjkur (NU), Sukiman Wirosandjojo (PII), Abikusno Tjokrosujoso (PSII), Agus Salim (Penyadar), Abdul Halim (PUI). Adapun yang berasal dari tokoh nasionalis antara lain, Radjiman Wedyodiningrat, Sukarno, M Hatta, Supomo, Muhamad Yamin, Wongsonegoro, Sartono, Suroso, dan Buntaran Martoatmodjo. Sidang BPUPKI membahas tentang bentuk negara, batas negara, dasar negara dan hal lain terkait pembentukan konstitusi bagi sebuah negara baru.
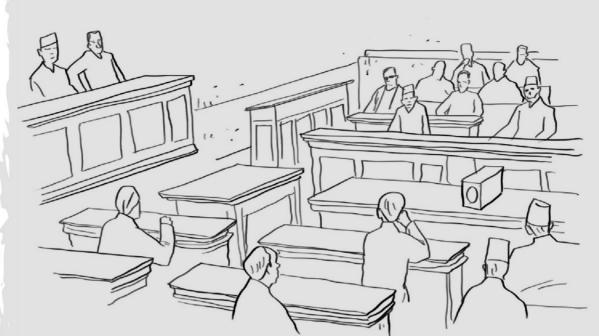
Sidang BPUPKI. Sumber foto: ANRI.

Dalam sidang BPUPKI, pembicaraan
tentang dasar negara terasa alot. Go
Islamis ingin menjadikan Indonesia
sebagai negara Islam, sedangkan go
nasionalis (yang kebanyakan anggo
juga beragama Islam), menginginka
pemisahan negara dari agama. Golo
nasionalis berpandangan bahwa ne
Indonesia didirikan oleh golongan la
berjuang melawan penjajah untuk r
kemerdekaan. Menjadikan Indonesi
sebagai negara Islam akan secara ti
memosisikan penganut agama lain
warga negara kelas dua.

Latihan TRI 1947.
Sumber foto:
www.zonaunik.com

Sidang pertama BPUPKI.
Sumber foto: ANRI.

Sementara kelompok Islamis kala itu tetap berpendirian bahwa Indonesia harus menjadi sebuah negara Islam, atau paling tidak Islam harus menjadi dasar ideologi negara. Kelompok nasionalis mengusulkan dibentuk negara kesatuan nasional sehingga seluruh golongan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama.

kiri
Poster Pahlawan Tank Nishizoemi 1940.
Sumber foto: www.indonesiaraja.blogspot.com

kanan
Poster Poster Heiho 1939-1945.
Sumber foto: www.indonesiaraja.blogspot.com

2 *LASKAR MILITER*

Ketika terdesak oleh tekanan pasukan Amerika Serikat pada 1943, Jepang membuka kesempatan bagi pemuda Indonesia untuk menjadi personil militer dengan status prajurit bantu Jepang yang disebut Heiho, dengan aperkiraan jumlah anggota mencapai 42.000 orang.

Meski telah membentuk Heiho, Jepang masih mengalami kekalahan, sehingga pada Oktober 1943 Jepang membentuk tentara Pembela Tanah Air (Peta). Berbeda dengan anggota Heiho yang tidak bisa menjadi perwira karena strukturnya di bawah langsung angkatan perang Jepang, personel Peta dapat menduduki posisi perwira atau komandan. Secara keseluruhan, personel Peta dari berbagai tingkatan di Pulau Jawa dan Bali berjumlah 38.000 orang.

Banyak komandan Batalion Peta dengan pangkat *daidancho* (mayor) berasal dari lingkungan pesantren. Antara lain, Tubagus Achmad Chatib (Banten), Sjam'oen (Banten), R.M. Moeljadi Djojomartono (Surakarta), Idris (Surakarta), R. Abdullah bin Noer (Bogor), Soetalaksana (Tasikmalaya) Pardjaman (Pangandaran), Masykoer (Bojonegoro), Cholik Hasjim (Surabaya), Doerjatman (Tegal), R. Amien Djakfar (Pamekasan), Abdoel Hamid Moedhari (Sumenep). Pada Juli 1943 Jepang juga memobilisasi sekitar 60 kiai ke Jakarta untuk mengikuti kursus dan latihan selama kurang lebih sebulan. Hingga Mei 1945, lebih dari seribu kiai menyelesaikan kursus pelatihan tersebut.

PIAGAM JAKARTA

Perdebatan tentang dasar negara yang terlihat dalam sidang BPUPKI tecermin dalam dokumen yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dokumen ini menggambarkan kompromi antara golongan Islam dan nasionalis dalam BPUPKI untuk menjembatani perbedaan dalam agama dan negara. Piagam Jakarta disusun pada 22 Juni 1945 dalam rapat Panitia Sembilan yang terdiri dari Sukarno, Mohammad Hatta, A. A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, H. Agus Salim, Ahmad Subardjo, K. H. Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin.

Panitia Sembilan awalnya menyusun naskah yang dimaksudkan sebagai teks proklamasi kemerdekaan, namun akhirnya dijadikan Pembukaan atau Preambule UUD 1945. Naskah inilah yang disebut Piagam Jakarta. Piagam Jakarta berisi nilai-nilai perlawanan terhadap imperialisme, kolonialisme, dan fasisme, serta sebagai dasar pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Dokumen ini merupakan sumber berdaulat yang mendahului proklamasi kemerdekaan dan konstitusi Republik Indonesia.

PIAGAM JAKARTA

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: **Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,** menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 22 Juni 1945

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI)

Panitia Sembilan

Haji Soekarno
Haji Achmad Soebardjo
Haji Abdul Kahar Muzakkir
Alex Andries Maramis

Abikoesno Tjokrosoejoso
Haji Mohammad Hatta
Haji Abdul Wahid Hasyim
Haji Agus Salim
Haji Mohammad Yamin

Naskah Piagam Jakarta.
Sumber foto: ANRI.

Dalam naskah tersebut terdapat kata-kata: "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Pada sore hari 17 Agustus 1945, Hatta didatangi oleh seorang perwira angkatan laut Jepang yang pernah menyampaikan keberatan para tokoh Indonesia bagian timur atas pemakaian kata-kata tersebut. Untuk menghindari perpecahan, esoknya sebelum sidang, Hatta mengadakan pembicaraan dengan tokoh-tokoh Islam. Mereka setuju untuk menghilangkan kata-kata tersebut dan menggantinya dengan kata "Yang Maha Esa", dengan rumusannya menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Kesepakatan ini diterima oleh sidang PPKI, meskipun tidak oleh semua golongan Islam.

SIdang BPUPKI.
Sumber foto:
PKN kelas 6.

Tokoh ulama yang berperan menegaskan konsep Ketuhanan yang akomodatif itu adalah K. H. Wahid Hasyim, ulama muda NU yang berpendapat bahwa "Ketuhanan Yang Esa" merupakan konsep tauhid dalam Islam sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak konsep tersebut dalam Pancasila. Artinya, dengan konsep tersebut, umat Islam mempunyai hak menjalankan keyakinan agamanya tanpa mendiskriminasi keyakinan agama lain. Di titik inilah, menjalankan Pancasila sama artinya dengan mempraktikkan Syariat Islam dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada sikap intoleransi kehidupan berbangsa atas nama suku, agama, dan lain-lain. Piagam Jakarta yang sudah mengalami perubahan itu kemudian ditetapkan sebagai Pembukaan UUD 1945.

BPUPKI menggelar dua kali rapat. Rapat pertama berlangsung pada 29 Mei-1 Juni 1945 di Gedung Cuo Sangi In dan rapat kedua dilaksanakan pada 10-16 Juli 1945. Sidang pertama menghasilkan penetapan Dasar Negara Pancasila sedangkan sidang kedua menghasilkan penetapan rancangan UUD 1945. Dalam sidang pertama, Muhamad Yamin mengucapkan pidato tentang asas-asas yang diperlukan sebagai dasar negara. Selanjutnya pada sidang 31 Mei, Soepomo juga mengungkapkan uraian tentang dasar-dasar negara. Akhirnya pada 1 Juni 1945, Sukarno menyodorkan lima butir yang kemudian diusulkan menjadi dasar negara. Pada saat itu, Sukarno jugalah yang pertama kali menyebut "Pancasila" untuk lima dasar yang diajukannya itu.

Perubahan lambang Garuda Pancasila.
Sumber foto: www.bbc.com

sidang lanjutan 1 Juni 1945 para pemimpin rakyat peserta sidang kebanyakan masih menyangsikan kemampuan bangsa Indonesia untuk merdeka. Meskipun demikian, kesangsian sikap itu justru dimanfaatkan oleh para tokoh bangsa menjadi energi positif untuk merumuskan dasar negara. Para pemimpin rakyat itu melalui perjuangan jiwa, raga, dan pikiran berhasil memerdekakan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Pancasila yang akomodatif dalam konteks sila Ketuhanan tersebut mewujudkan tatanan negara yang unik dalam aspek hubungan agama dan negara. Dalam arti, negara Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara Islam, melainkan negara yang berupaya mengembangkan kehidupan beragama dan keagamaan

Peran Kiai Wahid Hasyim bukan hanya mampu menjabarkan Pancasila secara teologis dan filosofis terhadap rumusan awal yang diajukan oleh Sukarno pada 1 Juni 1945, tetapi juga menegaskan bahwa umat Islam Indonesia sebagai mayoritas menunjukkan sikap inklusivitasnya terhadap seluruh bangsa Indonesia yang majemuk sehingga Pancasila merupakan dasar negara yang merepresentasikan seluruh bangsa Indonesia.

PANCASILA

 KETUHANAN YANG MAHA ESA

 KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

 PERSATUAN INDONESIA

 KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

 KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

PANDANGAN SEBAGIAN PENDIRI BANGSA PADA SIDANG BADAN PENYELIDIK USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA 28 MEI – 16 JULI 1945

"Maka lebih dahulu kita sekali lagi yakinkan bahwa bangsa Indonesia yang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa yang berperadaban luhur, dan peradabannya itu mempunyai Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, maka dengan sendirinya kita insaf bahwa Negara Kesejahteraan Indonesia Merdeka itu akan berketuhanan. Tuhan akan melindungi Negara Indonesia Merdeka itu".

Mohammad Yamin

"Teranglah Tuan-tuan yang terhormat bahwa jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran *(staatside)* negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh pikiran rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apa pun".

Supomo

"Kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima (Pancasila) menjadi tiga (Tri Sila), dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan "gotong-royong". Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong!"

Sukarno

"Usul saya tidak lain dan tidak bukan hanya menjaga supaya negara yang kita dirikan itu ialah negara pengurus, supaya negara pengurus ini nanti jangan menjadi negara kekuasaan, negara penindas. Dasar yang kita kemukakan ialah dasar gotong-royong dan usaha bersama. Pendek kata dasar *collectivism*".

Mohammad Hatta

"Oleh karena di sini ada macam-macam agama, supaya diusulkan apakah negara kita berdasar agama atau tidak. Kalau diputuskan tidak, tidak, habis perkara... Kita mengahadapi mata-mata musuh, Tuan-tuan, tetapi janganlah hendaknya kita berkeras-kerasan, tetapi berkepala dingin".

Ki Bagus Hadikusumo

"Jadi kalimat semacam itu (mewajibkan syariat Islam bagi pemeluknya) dapat membawa kekacauan yang bukan kecil terhadap adat-istiadat. Oleh sebab itu, baiklah kita mencari modus lain yang tidak membawa akibat yang bisa mengacaukan rakyat".

Johannes Latuharhary

5 RESOLUSI JIHAD

Akibat upaya Netherlands Indies Civil Administration (NICA) menjajah kembali Indonesia, K. H. Hasjim Asy'ari bersama dengan ulama lainnya wakil-wakil dari cabang NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya pada 21- 22 Oktober 1945, untuk mendeklarasikan perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai perang jihad. Resolusi Jihad menegaskan bahwa hukum membela Tanah Air adalah *fardhu ain* bagi setiap orang Islam di Indonesia. Tak hanya itu, dalam Resolusi Jihad juga ditegaskan bahwa muslimin yang berada dalam radius 94 kilometer dari pusat pertempuran wajib ikut berperang melawan Belanda.

Setelah resolusi, para kiai membentuk barisan pasukan *Sabilillah* yang dipimpin oleh K. H. Maskur. Para santri dan pemuda yang merespon seruan jihad tersebut berjuang dalam barisan *Hizbullah* yang dipimpin oleh H. Zainul Arifin. Sementara itu para kiai sebagai pemimpin berada di barisan *Mujahiddin* yang dipimpin oleh K. H. Wahab Abdullah. Dua minggu setelah Resolusi Jihad tersebut terjadilah pertempuran 10 November 1945.

perjuangan kemerdekaan yang melibatkan massa rakyat yang berlangsung empat tahun sesudahnya di berbagai tempat di Jawa hingga tercapai pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 1949.

Meski jalur Resolusi Jihad bersebrangan dengan "jalur diplomasi" , namun itu adalah suatu tanggapan yang cepat, tepat, dan tegas dari NU atas krisis kepercayaan dan kewibawaan sebagai bangsa yang baru menyatakan kemerdekaannya. Pada akhirnya, Resolusi Jihad merupakan bukti historis komitmen NU untuk membela dan mempertahankan Tanah Air. Selanjutnya Kemudian Presiden Joko Widodo menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.

Seruan Resolusi Jihad dikeluarkan sebagai keputusan Rapat Besar Konsul-konsul NU se-Jawa dan Madura pada 21-22 Oktober di Surabaya. Melalui konsul-konsul yang datang ke pertemuan tersebut, seruan ini kemudian disebarkan ke seluruh lapisan pengikut NU khususnya dan umat Islam umumnya di seluruh pelosok Jawa dan Madura.

Islam untuk berjuang mengangkat senjata melawan kehadiran Belanda. Soetomo (Bung Tomo), pimpinan laskar BPRI dan Radio Pemberontakan, yang memiliki hubungan dekat dengan kalangan Islam, selalu menyerukan "Allahu Akbar" di pembuka dan penutup orasinya yang disiarkan lewat Radio, sebagai upaya untuk merekrut kalangan pemuda Muslim. Seruan ini diyakini memiliki sumbangan besar atas Peristiwa 10 November 1945 yang heroik.

Berikut ini adalah isi dari Resolusi Jihad NU sebagaimana pernah dimuat di harian *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 26 Oktober 1945. Salinannya di sini dengan menyesuaikan ejaan:

Bung Tomo.
Sumber foto:
Alex Mendur.

Bismillahirrahmanirrahim
RESOLUSI

Rapat besar wakil-wakil daerah (Konsul-konsul) Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa-Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya.

Mendengar:

Bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa-Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan Alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan AGAMA, KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MERDEKA.

Menimbang:

a. *Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan Negara Republik Indonesia menurut hukum AGAMA ISLAM, termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam.*
b. *Bahwa di Indonesia ini warga Negaranya adalah sebagian besar terdiri dari Umat Islam.*

Mengingat:

a. *Bahwa oleh pihak Belanda (NICA) dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketenteraman umum.*
b. *Bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar Kedaulatan Republik Indonesia dan Agama, dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia.*
c. *Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan Kemerdekaan Negara dan Agamanya.*
d. *Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari Pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut.*

Memutuskan:

1. *Memohon dengan sangat kepada Pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan Agama dan Negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangan.*
2. *Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat "sabilillah" untuk tegaknya Negara Republik Indonesia Merdeka dan Agama Islam.*

Toentoetan Nahdatoel Oelama kepada Pemerintah Repoeblik.

Soepaja mengambil tindakan jang sepadan.

(Resoloesi wakil2 Daerah Nahdatoel Oelama seloeroeh Djawa-Madoera.

BISMILLAHIRROCHMANIR-ROCHIM.

RESOLOESI

Rapat besar wakil2 Daerah (Konsoel2) Perhimpoenan NAHDATOEL OELAMA seloeroeh Djawa-Madoera pada tg. 21-22 October 1945 di SOERABAJA, mendengar:

bahwa ditiap2 Daerah diseloeroeh Djawa-Madoera, ternjata betapa besarnja hasrat Oemmat Islam dan Alim Oelama ditempatnja masing2 oentoek mempertahankan dan menegakkan AGAMA, KEDAULATAN NEGARA REPOEBLIK INDONESIA MERDEKA;

menimbang:

a. bahwa oentoek mempertahankan dan menegakkan Negara Repoeblik Indonesia menoeroet hoekoem Agama Islam, termasoek sebagai satoe kewadjiban bagi tiap2 orang Islam.
b. bahwa di Indonesia ini warga Negaranja adalah sebagian besar terdiri dari Oemmat Islam.

mengingat:

a. bahwa oleh fihak Belanda (NICA) dan djepang jang datang dan jang berada disini telah sangat banjak sekali didjalankan kedjahatan dan kekedjaman jang mengganggoe ketenteraman oemoem.
b. bahwa semoea jang dilakoekan oleh mereka itoe dengan maksoed melanggar kedaulatan Negara Repoeblik Indonesia dan Agama, dan ingin kembali mendjadjah disini, maka dibeberapa tempat telah terdjadi pertempoeran jang mengorbankan beberapa banjak djiwa manoesia.
c. bahwa pertempoeran2 itoe sebagian besar telah dilakoekan oleh Oemmat Islam jang merasa wadjib menoeroet hoekoem Agamanja oentoek mempertahankan Kemerdekaan Negara dan Agamanja.
d. bahwa didalam menghadapi sekalian kedjadian2 itoe beloem mendapat perintah dan toentoenan jang njata2 dari Pemerintah Repoeblik Indonesia jang sesoeai dengan kedjadian2 terseboet.

memoetoeskan:

1. **memohon dengan sangat kepada Pemerintah Repoeblik Indonesia, soepaja menentoekan soeatoe sikap dan tindakan jang njata serta sepadan terhadap tiap2 oesaha jang akan membahajakan kemerdekaan Agama dan Negara Indonesia, teroetama terhadap fihak belanda dan kaki-tangannja.**
2. **soepaja memerintahkan melandjoetkan perdjoeangan bersifat „sabiloellah" oentoek tegaknja Negara Repoeblik Indonesia Merdeka dan Agama Islam.**

Resolusi Jihad. Sumber foto: www.nusurabaya.or.id

ISLAM DAN EKSPERIMEN DEMOKRASI

Karikatur Sukarno dan NASAKOM karya Thiotsan. Sumber : Wartha Bhakti 7 Januari 1965.

Sesudah kedaulatan RI tercapai, maka wajah politik tanah air saat itu diwarnai dengan berbagai eksperimen demokrasi yang dilakukan oleh segenap elemen-elemen politik di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada dinamika politik khususnya di kalangan Islam seperti Masyumi. Pada awalnya, anggota-anggota Masyumi tidak ingin membentuk partai politik karena mereka khawatir akan dampak pendirian partai politik berlabel Islam kepada Kesatuan Nasional Republik. Sesudah kemerdekaan RI dapat dipastikan, dan melihat situasi politik serta kemudia hasil Pemilu 1955 yang mengecewakan membuat Masyumi tampil sebagai partai politik dengan ciri garis Islamis yang lebih tegas.

Hal tersebut merupakan reaksi keras atas manuver politik Presiden Sukarno yang mencoba bereksperimen, dengan bentuk demokrasi yang ada di Indonesia yaitu Demokrasi Parlementer yang berlangsung antara tahun 1950 sampai 1957. Masa itu dikenal sebagai masa yang tidak stabil secara politik, karena negara mengalami enam kali pergantian pemerintahan.

Masyumi bisa dikatakan sebagai partai pemerintah karena lima tokohnya memperoleh jabatan di pemerintahan, dan juga karena Masyumi merupakan salah satu dari empat partai politik besar masa itu.

Namun, hubungan Masyumi dan Sukarno sendiri semakin memburuk. Sesudah Konferensi Asia–Afrika yang diadakan di Bandung, Sukarno cenderung bergerak mendekati dunia ketiga dan kekuatan kiri Asia-Afrika yang diwakili oleh Presiden Nasser dari Mesir dan Perdana Menteri Nehru dari India.

Pada 1957 Sukarno mengumumkan rencana untuk menghapuskan Demokrasi Parlementer dan mengubahnya menjadi Demokrasi Terpimpin. Sukarno juga menghapuskan posisi Wakil Presiden, sehingga mengakhiri dwitunggal Sukarno–Hatta yang sudah ada sejak 1945.

Sementara itu, Natsir; tokoh Persis yang ada di Masyumi selalu menegaskan komitmen Masyumi ke musyawarah demokratis, dan—karena antikomunis—menampilkan kecenderungan ke kebijakan luar negeri yang condong pro-Amerika.

kiri
Surat suara Pemilu.

kanan
Anggota militer ikut memilih.
Sumber foto: ANRI.

1 PEMILU 1955

Pendirian partai-partai Islam dimulai ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat 3 Oktober 1945. Meski terdapat kekhawatiran, pendirian Partai Masyumi tetap berjalan. Ketika itu, Masyumi disokong oleh beberapa ormas Islam, yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama', Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam, yang disusul dengan bergabungnya Pesatuan Islam dan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Bergabungnya beberapa ormas Islam tersebut memperlihatkan kekuatan Masyumi sebagai representasi politik umat Islam saat itu. Pada 1952, kekuatan Masyumi sedikit melemah sebagai akibat dari konflik internal yang terjadi ditubuh Masyumi. Konflik itu akhirnya melahirkan sebuah partai politik Islam baru. Ketika itu, NU menarik diri dari keanggotaan Masyumi dan membentuk partai NU. Hal yang sama diikuti oleh Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti) yang pada November 1952 mengundurkan diri dan menjadi partai politik tersendiri.

Meskipun begitu, kekuatan Masyumi masih besar, terbukti pada Pemilu 1955, Masyumi merupakan partai Islam yang mendapatkan suara terbanyak, yaitu sebesar 20,9%. Jumlah kursi yang diperoleh Masyumi sama dengan jumlah kursi yang didapatkan PNI (Partai Nasional Indonesia), yaitu 57 kursi, walaupun persentase yang diperoleh PNI lebih besar yaitu 22,3%. Namun, perolehan suara Masyumi tersebut tidak dapat dianggap sebagai representasi umat Islam karena beberapa partai pecahan Masyumi berhasil "menggembosi" perolehan suara Masyumi seperti NU dengan 18,41% (45 kursi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dengan 2,89% (8 kursi), Perti dengan 1,28 % (4 kursi), dan Partai Politik Tarekat Islam (PPTI) dengan 0,22% (1 kursi).

Hasil pemilu ini mengindikasikan bahwa partai Islam merupakan kekuatan penyeimbang dalam konstelasi politik nasional. Ada empat partai Islam yang masuk dalam sepuluh besar partai yang meraih suara terbanyak dalam Pemilu 1955, yaitu Masyumi, Nahdlatul Ulama, PSII, dan Perti. Keberadaan partai-partai Islam ini sangat diperhitungkan dalam peta perpolitikan nasional yang akan berdampak pada perumusan dan pembuatan kebijakan nasional.

HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILU 1955

Sidang Konstituante. Sumber foto: wikkicommon

2 ISLAM DAN PERDEBATAN KONSTITUSI
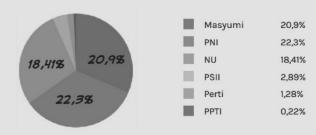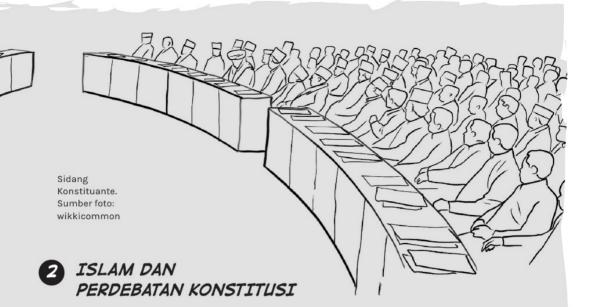
Dinamika politik dan pergerakan partai Islam dalam politik Indonesia semakin terasa ketika Dekrit Presiden dikeluarkan oleh Presiden Sukarno. Dekrit tersebut merupakan hal yang fundamental bagi perkembangan konstitusi di Indonesia, karena setelah hampir tiga tahun (1956-1959) Majelis Konstituante bersidang untuk merumuskan UUD, tetapi tidak juga tercapai kata sepakat atau korum dalam pengambilan keputusan tentang dasar negara. Hal itu merupakan kelanjutan dari kekecewaan tokoh-tokoh Islam terhadap sikap pimpinan nasional RI yang mengubah isi Piagam Jakarta pada 17-18 Agustus 1945. Wakil rakyat yang duduk dalam pemerintahan mengamanatkan untuk segera diadakan Pemilu untuk memilih parlemen yang akan bertugas menyusun UUD negara. Amanat tersebut baru bisa dijalankan pada 29 September 1955 setelah pengakuan kedaulatan dalam bentuk pemilu untuk memilih anggota parlemen, dan selanjutnya pada 15 Desember 1955 diadakan pemilu untuk memilih anggota Majelis Konstituante. Majelis Konstituante sendiri dilantik pada 10 November 1956 dan melaksanakan sidang terakhirnya 2 Juni 1959, sebelum dibubarkan oleh Presiden Sukarno.
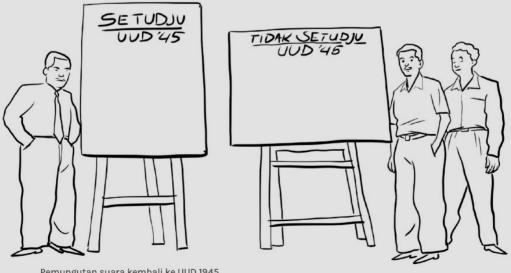
Pemungutan suara kembali ke UUD 1945.
Sumber foto: www.pekerjamuseum.blogspot.co.id

Ilustrasi tiga kubu yang sedang berdebat (Kubu Pancasila, Kubu Islam dan Kubu Ekonomi-Sosialis-Dmokrasi).

Salah satu sidang pleno Majelis Konstituante yang paling menarik perhatian masyarakat luas dan paling sengit perdebatannya terjadi pada 11 Nopember hingga 6 Desember 1957 yang membahas masalah dasar negara. Sidang yang dilaksanakan dalam dua babak itu melibatkan 47 pembicara dalam babak pertama dan 54 pembicara dalam babak kedua. Masing-masing kubu beragumentasi dengan kuat tentang dasar negara. Ada tiga kubu yang terlibat perdebatan. Kubu Pancasila, kubu Islam dan kubu Ekonomi Sosialis-Demokrasi. Kubu yang menginginkan dasar negara Pancasila diajukan oleh PNI (Partai Nasional Indonesia), PKI (Partai Komunis Indonesia), Republik Proklamasi, Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Katolik, PSI (Partai Sosialis Indonesia), dan IPKI (IKatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bersama 14 faksi kecil lainnya. Mereka memiliki 274 kursi dalam Majelis Konstituante. Sementara kubu yang menginginkan Islam sebagai dasar negara, memiliki 230 kursi. Mereka terdiri dari empat faksi besar, yaitu Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), NU (Nahdhatul Ulama), PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia), Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) dan empat fraksi kecil lainnya. Sedangkan kubu yang menginginkan dasar negara Ekonomi Sosialis dan Demokrasi hanya memiliki 10 kursi. Mereka terdiri dari Partai Buruh, Partai Murba dan Acoma.

Karena tidak mencapai kata sepakat maka muncullah usulan dari Presiden Sukarno dan pimpinan TNI Jenderal Abdul Haris Nasution untuk kembali kepada UUD 1945. Terhadap usulan pemerintah itu, faksi pro Sukarno, PNI dan PKI serta merta menyetujuinya. Sementara itu, fraksi Islam menginginkan Konstutante tetap bekerja menyelesaikan pekerjaannya semula. Mereka tidak menerima UUD 45 tanpa melalui sebuah revisi. Faksi Islam menyatakan bahwa mereka menerima kembali UUD 1945, dengan catatan Piagam Jakarta dicantumkan dalam UUD 45 dan mempunyai kekuatan hukum sebagai bagian darinya. Menanggapi usulan faksi Islam itu, PM Djuanda pada 22 April 1959 dalam keterangannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan wakil-wakil Islam di Majelis Konstituante menyatakan bahwa Piagam Jakarta tanpa tujuh kata tersebut sudah menjiwai UUD 1945 dan oleh karena itu sudah cukup sebagai dasar bagi pelaksanaan hukum agama.

Keterangan pemerintah tersebut belum memuaskan fraksi Islam, maka diambillah pemungutan suara di Konstituante. Hasilnya 201 pro dan 265 kontra dari 470 anggota Konstituante yang hadir. Fraksi Islam kalah tipis. Hal itu menunjukkan ada pertentangan yang keras baik dari kubu Islam maupun dari kubu Pancasila dalam menyikapi usulan untuk memasukkan kembali tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Usulan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945, tanpa revisi, juga dilaksanakan melalui pemungutan suara di Majelis Konsituante. Konstituante bahkan sampai melakukan tiga kali pemungutan suara. Karena kemenangan fraksi Pancasila tidak memenuhi korum (kurang dari 2/3 suara)-sebagaimana diamanatkan dalam UUD 45—maka hasil pemungutan suara itu tidak dimenangkan oleh salah satu pihak.

Kemudian pimpinan TNI dan wakil-wakil Konstituante mengusulkan kepada Presiden Sukarno agar segera mengeluarkan dekrit. Menteri Penerangan Roeslan Abdulgani diutus menghadap Sukarno yang sedang berkunjung ke Tokyo, untuk memberi laporan tentang perkembangan politik dalam negeri. Presiden pun segera pulang ke Tanah Air pada 29 Juni 1959. Rumusan dekrit itu akhirnya ditandatangani pada 4 Juli 1959 dan diumumkan di Istana Merdeka pada 5 Juli 1959.

3 NASAKOM

Selain eksperimen dalam bentuk demokrasi dan dekrit, Presiden Sukarno melontarkan gagasan tentang Nasionalisme-Agama-Komunisme (Nasakom). Latar belakang dari gagasan Nasakom adalah kekhawatiran akan upaya adu domba antara golongan nasionalis, agama, dan komunisme. Golongan agama, menurut Sukarno cukup diwakili oleh dua kelompok, yakni Muhammadiyah dan NU. Sedangkan kaum Komunis diwakili oleh PKI dan Partai Murba digunakan sebagai penyeimbang dalam menghadapi golongan komunis.

Gagasan mempersatukan kekuatan nasionalis, agama, dan komunis dalam pemerintahan muncul karena adanya kekhawatiran akan perpecahan yang terjadi pada bangsa Indonesia jika ketiga golongan di atas dibiarkan saling bertentangan. Gejala tersebut misalnya muncul ketika PKI mendukung serangkaian kegiatan budaya, yang jelas-jelas melecehkan agama dan peranannya dalam kehidupan. Hal itu terjadi, karena memang golongan Islam yang didominasi oleh Masyum menentang negara Pancasila dan m... serta menyerukan se...

Penangkapan anggota PKI oleh ormas militer.
Sumber foto: www.intisari.grid.id

Demonstrasi anti komunis.
Sumber foto: AP.

4 MENUJU KRISIS 1965

Perseteruan golongan Islam dan golongan komunis di Indonesia sudah memanas sebelum pemilihan umum digelar pada 1955. Pada 1954, Partai Masyumi menggelar rapat besar di Malang, Jawa Timur, untuk menandingi rapat umum PKI di tempat yang sama. Kedua partai masing-masing mengerahkan massanya ke alun-alun kota Malang. Bahkan massa Masyumi yang datang dari Surabaya dan Malang membaur bersama ribuan anggota PKI yang sedang menunggu kehadiran Ketua PKI DN Aidit dan Eric Aarons, perwakilan Partai Komunis Australia yang juga akan berpidato.

Emosi kedua massa akhirnya tersulut setelah Aidit mulai berpidato. Dalam pidatonya, Aidit menyinggung Masyumi. Massa Masyumi menuntut Aidit mencabut kata-katanya. Aidit pun menuruti, Namun, terlambat. Pertemuan pun berakhir ricuh. Massa Masyumi merampas semua atribut kampanye PKI. Insiden itu merupakan bentrok terbesar antara Masyumi versus PKI sepanjang 1954. Bukan hanya simpatisan dan tokoh politik, media massa *underbouw* kedua partai pun berseteru lewat judul-judul berita diterbitan mereka. Masyumi dengan Majalah *Hikmah* dan koran *Abadi*, sedangkan PKI dengan *Harian Rakjat.*

Konflik PKI versus Masyumi berakhir ketika Presiden Sukarno membubarkan Masyumi melalui Keputusan Presiden No. ... tahun 1960. Keterlibatan Masyumi dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) menjadi alasan bagi pemerintah Sukarno untuk membubarkan partai itu. Hingga akhirnya terjadilah peristiwa September 1965 yang diduga melibatkan anggota dan simpatisan PKI.

Demo mahasiswa 1966.
Sumber foto: www.merdeka.com

Sidang Umum MPR 1978.
Sumber foto: ANRI.

Pergantian Rezim Orde Lama ke Orde Baru sebagai dampak peristiwa September 1965 membawa pengaruh yang besar terhadap perkembangan politik. Pada masa awal Orde Baru berkuasa kehidupan kepartaian dan parlemen mengalami situasi yang sulit. Belajar dari pengalaman konflik berkepanjangan di masa lalu, diikuti oleh kebutuhan untuk memperoleh dukungan politik masyarakat, Orde baru mengeluarkan sejumlah langkah-langkah yang mengatur kehidupan partai Pengaturan kepartaian ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Orde Baru memulai penataan kepartaian dengan merehabilitasi Partai Murba dan mendirikan Parmusi sebagai wadah peleburan ormas Islam sebagai jawaban atas penolakan tuntutan untuk mengembalikan Masyumi. Pada saat yang bersamaan pemerintahan Orde Baru sendiri membentuk Golkar sebagai mesin politik. Penggunaan nama Golkar untuk menghindari kata "parpol" guna menunjukkan bahwa kekuatan ini tidak terlibat dan tidak terkait dengan instabilitas politik di masa lalu.

Landasan legal bagi penataan kepartaian juga disiapkan, yakni melalui Tap MPRS XII/MPRS/66 tentang Kepartaian. Dalam Tap tersebut diputuskan bahwa pemerintah bersama DPRGR akan membentuk UU kepartaian, keormasan dan kekaryaan yang menuju pada penyederhanaan. Inti utama penataan kepartaian adalah de-ideologisasi berupa pelarangan penggunaan ideologi oleh parpol, kecuali dalam bentuk penerapan "asas tunggal Pancasila" (dalam UU 3/1982 disebutkan "partai politik dan Golongan Karya berazaskan Pancasila sebagai satu satunya azas") yang ditafsirkan menurut kepentingan kekuasaan Orde Baru. Kebijakan itu diindoktrinasikan kepada masyarakat melalui program penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Dampak kebijakan itu menjadi sangat serius bagi partai-partai. Bagi PNI mislanya, karena membenturkan Marhaenisme dan Pancasila sebagai dua hal yang bertentangan sehingga melahirkan banyak persoalan politik

dan psiko-politik di dalam tubuh PNI. Sedangkan bagi partai politik Islam hasil fusi, seperti PPP membuat mereka kehilangan basis pemilihnya.

Keharusan menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi di Indonesia, membuat para ulama, ustaz, dan kiai kampung yang menjadi pegawai negeri harus memendam aspirasi politiknya. Tidak bisa tidak mereka harus mengakomodasi kehendak pemerintah untuk selalu memenangkan Golkar.

Langkah kedua penataan kepartaian Orde Baru adalah penyederhanaan kepartaian dari sepuluh menjadi tiga, yakni Golkar, PDI, dan PPP. Dua partai terakhir merupakan hasil fusi yang dipaksakan setelah melalui proses selama kurang lebih 3 tahun. PDI berfusi pada 10 Januari 1973 sementara PPP pada 5 Januari 1973 setelah adanya "ancaman pembubaran" oleh Suharto sebelum 11 Maret 1973.

Termasuk Partai Nahdlatul Ulama "dipaksa" bergabung dengan tiga partai muslim lain, menjadi Partai Persatuan Pembangunan Idham Chalid, sebagai tokoh terpenting NU di pentas politik nasional angsung menerima fusi tanpa terlebih dulu bermusyawarah dengan anggota PBNU lain. Akibatnya muncul ketidakpuasan di kalangan informal NU. Namun pada akhirnya, semua setuju untuk berbuat yang terbaik dalam kondisi baru itu dibandingkan menantang secara terbuka. Sebagian pemimpin NU berpendapat bahwa perubahan ini akan menguntungkan NU. Wakil ketua PBNU Achmad Sjaichu mengutarakan pandangannya, bahwa keterlibatan NU dalam politik praktis telah mengorbankan tugas-tugas pendidikan dan dakwah yang seharusnya dilakukan oleh NU. Melalui kehadiran PPP, politik dapat diserahkan kepada para politikus dan NU akan kembali menjadi sebagaimana aslinya, yaitu organisasi keagamaan.

Pertemuan tokoh-tokoh politik 1971.
Sumber foto: Kompas (Pat Hendrato).

kiri
Pengesahan daftar calon tetap oleh Amir Machmud (Mendagri). Sumber foto; Kompas (Pat Hendrato).

kanan
Ilustrasi Suharto & Tien Suharto mengikuti pemilu.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa fusi memang mampu mengurangi konflik dan pertentangan politik meski sebenarnya yang terjadi hanya merupakan pengalihan dari konflik politik nasional di masa lalu menjadi konflik dalam tubuh internal parpol. Jika pola konflik PPP dan PDI selama periode Orde Baru diperhatikan, pada prinsipnya memiliki persamaan dengan konflik politik nasional di masa lalu dalam skala yang berbeda.

Langkah ketiga dari penataan kepartaian adalah kebijakan pengisolasian atau pemutusan hubungan antara partai dan para pendukungnya. Hal ini dilakukan melalui konsep "massa mengambang" atau *Floating Mass* dimana kepengurusan parpol dilarang untuk berada di bawah tingkat kabupaten. Terhadap pegawai negeri diperkenalkannya konsep monoloyalitas yang intinya melarang PNS terlibat dalam parpol, tapi sepenuhnya harus memberikan dukungan pada Golkar.

Perubahan-perubahan ini membuat parpol, semakin terpuruk karena UU yang baru juga mengatur secara sangat ketat kehidupan parpol dan memberikan kewenangan yang sangat besar pada presiden. Parpol diwajibkan melaksanakan, mengamalkan dan mengamankan Pancasila (Pasal 7 (a)) serta dikenakan berbagai larangan (Pasal 12). Sementara Presiden diberi hak untuk "membekukan" pengurus parpol/Golkar. Melalui UU ini landasan legal bagi tindakan-tindakan tersebut tersedia dengan sangat kuat. Hasil akhirnya adalah parpol kehilangan semua fungsi sebagai sebagai parpol. PPP dan PDI, dalam praktiknya tidak lebih dari semacam anak cabang atau ranting dari pemerintah yang jauh dari fungsinya sebagai agregator dan artikulator kepentingan masyarakat.

NU sebelumnya adalah partai yang jauh lebih besar dibanding partai-partai lain yang bergabung dalam PPP. Meski fusi partai ini tidak dimaksudkan untuk

menghilangkan identitas komponen-komponennya, tetapi sejarah PPP berikutnya kerap ditandai oleh konflik-konflik antara keempat komponen ini dalam pembagian jatah kursi. Dalam konflik-konflik itu, NU lebih sering menjadi faksi yang dirugikan. Bagi NU, peleburan diri ke dalam PPP seperti kembali ke masa ketika menjadi bagian dari Masyumi. Tidak sulit meramalkan bahwa sebagian problem dan konflik lama kembali meledak karena adanya ketimpangan antara kekuasaan massa pendukung yang besar dan jumlah politikus yang berkeahlian.

Sebagai kelompok dominan di dalam PPP. Anggota NU mendapatkan jatah yang adil dalam jabatan pengurus. Ketua Umum PBNU Idham Chalid diberi kedudukan bergengsi walaupun kurang berpengaruh karena ketua eksekutif diberikan kepada Mintaredja dari Parmusi. Rois Aam NU Kiai Bisri Syansuri juga menjadi presiden Majelis Syuro PPP, dewan ulama yang menurut teorinya dapat mengeluarkan fatwa yang secara konstitusional harus diikuti partai. Berulangkali, saat-saat kritis selama 1970-an, Kiai Bisri mengeluarkan keputusan tegas tentang pendirian partai.

Kiai Bisri adalah pemimpin yang lebih suka menghindari konflik dengan pemerintah tapi menolak bersikap kompromi apabila menyangkut prinsip agama. Hal inilah yang justru membuat Kiai Bisri terlibat dalam benturan serius dengan pemerintah. Pertama, ketika rencana undang-undang

Warga antri memilih di Pemilu 1971.
Sumber foto: Kompas (Hendianto).

RX

perkawinan dibawa ke sidang DPR pada 1973. Beberapa pasal dalam Undang-Undang ini dianggap bertentangan dengan hukum keluarga dalam fikih, dan Kiai Bisri menolaknya dengan lantang. Semua kelompok PPP di DPR menyatakan penolakan atas undang-undang tersebut. Kedua, pada pemilu 1977, Kiai Bisri mengeluarkan fatwa yang menyatakan setiap Muslim wajib hukumnya memilih PPP sekalipun harus kehilangan jabatan dan mata pencaharian. Beberapa kiai memihak ke Golkar, tapi NU terbukti mampu mempertahankan disiplin internal yang kuat. Dalam pemilu 1977, PPP berhasil mendapat tambahan 5 kursi lebih banyak dari pemilu 1971. PPP juga memperoleh kemenangan yang penting secara psikologis dengan mengalahkan Golkar di ibu kota dan meraup suara mayoritas mutlak di Aceh.

Benturan paling serius terjadi pada Sidang Umum MPR 1978, Kiai Bisri Syansuri dan para anggota NU yang diikuti kelompok lain di PPP secara demostratif meninggalkan tempat sidang *(walk out)* saat dilangsungkan voting atas pasal dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengandung dua hal yang sulit diterima kebanyakan umat Muslim Indonesia. Pertama adalah kedudukan aliran kepercayaan yang berdampingan dengan agama-agama resmi, secara implisit memberikan pengakuan formal kepada aliran kepercayaan

Suasana kampanye Pemilu 1982.
Sumber foto:
A. Haryandoko D.
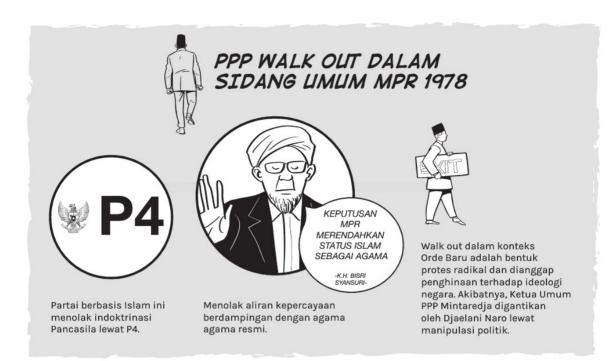
sebagai agama tersendiri. Kedua adalah usulan program pemerintah melakukan indoktrinasi ideologi negara, Pancasila secara massal, menjadi keharusan asas tunggal Pancasila.

Bagi Orde Baru, yang sangat menekankan konsensus, tindakan "walk out" ini adalah bentuk protes yang sangat radikal. Pemerintah memandang kejadian ini sebagai penghinaan terhadap penguasa dan ideologinya. Kejadian ini memperkuat tekad Orde Baru untuk melakukan depolitisasi terhadap Islam Indonesia. Reaksi pertama adalah penggantian Ketua Umum PPP Mintaredja dengan Djaelani Naro.

Pada 1980, sekali lagi NU melancarkan protesnya dengan aksi "walk out" atas rancangan undang-undang baru yang mengatur proses pemilu. Partai-partai (PPP dan PDI) menginginkan agar undang-undang ini memuat jaminan-jaminan netralitas pemerintah dalam proses pemilu, tetapi pemerintah menolak memberikannya. Naro, pimpinan PPP yang baru, mengalah dan memerintahkan anggotanya untuk menyetujui undang-undang itu. Namun semua anggota NU di PPP secara terang-terangan enggan masuk ke ruang sidang ketika undang-undang itu disahkan. Kiai Bisri, sebagai figur ulama yang membuat NU tak kenal kompromi, pada saat itu telah sakit-sakitan, kemudian pada April 1980 meninggal dunia, PPP tidak lagi mempunyai figur kepemimpinan moral yang kuat.

Musyawarah Nasional Alim Ulama (Munas) NU pada tahun berikutnya di Kaliurang, Yogyakarta, memilih seorang Rais Aam *ad interim*, Kiai Ali Ma'shum dari Krapyak, Yogyakarta. Munas kali ini menarik perhatian banyak orang karena tidak melakukan "kebulatan tekad" menjelang Pemilu yang mengharapkan agar Suharto bersedia menjabat kembali sebagai Presiden untuk masa bakti berikutnya. Sikap NU yang secara eksplisit menolak ikut dalam koor ini dipandang sebagai tanda dari sikap melawan.

KEBANGKITAN ISLAM KELAS MENENGAH

Suasana bedah buku di UIN 2017.
Sumber foto: www.psikiindonesia.org
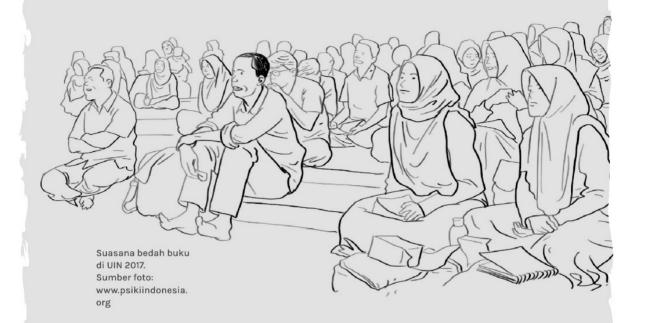
Kandasnya berbagai agenda politik Islam di awal pemerintahan Orde Baru tidak terlepas dari kebijakan pemerintah membatasi dan mengawasi setiap kegiatan yang berpotensi disusupi kepentingan politik, mengganti azas organisasi dengan azas tunggal Pancasila, kebijakan reorganisasi dan fusi partai, normalisasi kegiatan kemahasiswaan di kampus-kampus agar mahasiswa hanya fokus pada perkuliahan saja. Agenda politik Orde Baru mencakup depolitisasi Islam. Agenda ini, didasarkan pada anggapan bahwa Islam yang kuat secara politik akan menjadi hambatan bagi modernisasi. Melalui depolitisasi Islam, Orde Baru akan mempertahankan kekuasaan dan melindungi kepentingan-kepentingannya. Hasilnya selama enam kali pemilihan umum Golkar selalu memenangkan pemilihan umum.

Namun walau Islam secara politik mendapat tekanan dari Orde Baru, secara kultural muncul kebangkitan Islam di kalangan menengah. Hal tersebut tidak terlepas dari berkembangnya aktivisme di dunia Islam sejak akhir 1970-an. Kebijakan Orde Lama yang cenderung berhaluan kiri dan berujung pada bencana bagi ekonomi Indonesia, membuat prioritas pertama rezim Orde Baru adalah memulihkan ekonomi negara melalui kebijakan pembangunan pragmatis. Untuk itu Angkatan Bersenjata sebagai komponen utama Orde Baru mengambil peran utama melalui prinsip dwifungsinya. Fungsi tersebut adalah menjamin keamanan politik untuk pertahanan nasional dan hukum serta ketertiban domestik, juga juga hadirnya stabilitas ekonomi melalui pembuatan kebijakan pembangunan dan perdagangan swasta. Untuk mencapai tujuan tersebut, meski harus membatasi dan mengawasi kekuatan politik Islam, Orde Baru juga masih membutuhkan peran teknokrat dan profesional Muslim dalam mendukung agendanya.

B. J. HABIBIE

Intelektual Muslim Indonesia bisa bekerja sama dengan rezim Orde Baru, selama para intelektual Muslim tersebut setuju dengan doktrin dasar negara Pancasila, dan menjauhi politik partai Islam. Seiring waktu, pemimpin komunitas Muslim, teknokrat, profesional, intelektual, dan aktivis lainnya menjadi semakin percaya diri dengan peran mereka sebagai aktor sosial dan politik dalam masyarakat yang juga semakin tegas dalam mengekspresikan keberagamaannya.

Lahirnya kekuatan Islam kelas menengah baru tersebut ditandai dengan pembentukan ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia). Lahirnya ICMI awalnya dimulai dari rencana lima aktivis mahasiswa muslim yang ingin melaksanakan simposium di Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur. Agar mendapatkan izin rektor, mereka mencari dukungan dari dua intelektual Muslim senior, Imaduddin Abdulrahim (1931–2008), insinyur lulusan AS dan mantan aktivis HMI, dan M. Dawam Rahardjo (1942-2018), seorang ekonom dan aktivis sosial Muhammadiyah, yang menyarankan untuk mengubah rencana simposium kampus menjadi gerakan lebih besar untuk menyatukan berbagai kelompok intelektual muslim.

Supaya mendapatkan dukungan resmi yang diperlukan, para mahasiswa tersebut bersama dengan Rahardjo, Abdulrahim dan jurnalis M. Syafii Anwar - bertemu B. J. Habibie. Habibie menyatakan dukungan, setelah berkonsultasi dengan Presiden, yang melihat rencana kegiatan ini sebagai sebuah peluang untuk memobilisasi basis dukungan politik baru. Suharto menginstruksikan Habibie agar mengambil alih gerakan tersebut dalam bentuk diskusi formal yang akan mempertemukan pejabat pemerintah, Muslim, teknokrat, akademisi, aktivis, dan tentunya para pemimpin organisasi masyarakat Muslim Indonesia.

Meski demikian, rencana pembentukan ICMI tidak berlangsung lancar. Tantangan pertama yang melanda ICMI adalah adanya penolakan seorang tokoh besar intelektual Muslim, pemimpin NU, Abdurrahman Wahid, yang menolak untuk bergabung, dan malah mendirikan sebuah badan intelektual tandingan yang lebih inklusif dan kritis yang disebut Forum Demokrasi.

Meskipun telah dianggap sebagai 'titik balik politik akomodasi negara terhadap Islam', kehadiran ICMI tetap dianggap belum mampu menggantikan ormas Islam yang telah memiliki struktur berkelanjutan seperti Muhammadiyah dan NU, serta lembaga-lembaga lain seperti partai politik, MUI, dan birokrasi negara secara umum. Namun berdirinya ICMI menjadi tanda penting pada politik Islam berupa penegasan dan peningkatan signifikan partisipasi teknokrat, profesional, dan intelektual muslim secara umum dalam kehidupan politik di Indonesia. Pada tingkat ekonomi seiring dengan pendirian ICMI berhasil juga didirikan Bank Muamalat sebagai indikator perkembangan ekonomi syariah.

Pergerakan politik Islam juga ditandai dengan munculnya kegiatan dakwah Islam yang diawali melalui kegiatan pengajian dan Majlis Ta'lim di lingkungan perumahan dan kampung-kampung, yang kemudian tetapi kemudian juga diadakan di gedung mewah seperti hotel-hotel berbintang, kalangan birokrasi pemerintahan, dan sebagainya. Fenemona ini dibarengi dengan munculnya Dai dan Ustaz yang memiliki jemaat yang loyal. Seiring dengan rileksnya pengawasan dan pembatasan dari pemerintah berbagai kegiatan dakwah yang melibatkan masa dalam jumlah besar seperti tablig akbar mendapat sambutan ribuan pengunjung, begitupun dengan seminar-seminar keIslaman yang diadakan di kampus-kampus seperti UI, ITB, IPB, Trisakti, dan UGM. Kebangkitan kultural juga dapat dilihat dari hadirnya buku-buku Islam terbitan baru dengan tampilan menarik yang diterbitkan secara besar-besaran.

Diskusi ilmiah UIN Walisanga. Sumber foto: www.kammi_Walisanga.blogspot.com

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

NAH..DI SANALAH BEDANYA MASUKNYA AGAMA-AGAMA DI NUSANTARA DENGAN TEMPAT LAIN
KAK, ISLAM MASUK KE INDONESIA DENGAN PERANG?
TANPA TERASA DISKUSI NABILA DAN NADIA TERUS BERLANGSUNG HINGGA KE TOPIK KERUKUNAN AGAMA..

IYA KAK, KALAU NABILA LIHAT POPULASI ISLAM MENCAPAI JUMLAH 90% PENDUDUK INDONESIA DARI SABANG HINGGA MERAUKE

JUSTRU ITU.. SEBABNYA 90% PENDUDUK INDONESIA MASUK ISLAM. KARENA ISLAM MASUK KE NUSANTARA LEWAT CARA-CARA DAMAI

NAH BAGAIMANA UMAT ISLAM NUSANTARA MEWUJUDKAN CARA-CARA DAMAI ITU, KAK? ADA 10% PEMELUK NON ISLAM DI INDONESIA, TETAPI ADA JUGA DAERAH YANG JUMLAHNYA LEBIH BANYAK DARI UMAT ISLAM
BAIKLAH AKAN KAKAK KASIH CONTOH BAGAIMANA UMAT ISLAM MENJAGA KEHARMONISAN DAN DAPAT HIDUP BERDAMPINGAN, MESKI ORANG ISLAM JUMLAHNYA LEBIH BANYAK ATAU BAHKAN KETIKAMENJADI MINORITAS DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

UPACARA-UPACARA KEAGAMAAN

Upacara adat Sasi Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Dalam Islam dikenal konsep *rahmatan lil alamin* yang artinya Islam pembawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Hal ini diwujudkan melalui peran aktif umat Islam dengan turut menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia yang majemuk ini. Faktanya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia dapat hidup berdampingan sejak dahulu dengan pemeluk agama lainnya dan menghargai agama-agama dan berbagai kepercayaan yang telah lebih dahulu masuk di Nusantara. Hal tersebut diwujudkan dalam berbagai tradisi dan upacara-upacara kerukunan antar umat beragama yang terus dipelihara sejak dahulu hingga sekarang.

1. Setiap pemeluk agama memandang pemeluk agama lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan dan saudara sebangsa.
2. Setiap pemeluk agama memperlakukan pemeluk agama lain dengan niat dan sikap baik, empati, penuh kasih sayang, dan sikap saling menghormati.
3. Setiap pemeluk agama bersama pemeluk agama lain mengembangkan dialog dan kerjasama kemanusiaan untuk kemajuan bangsa.
4. Setiap pemeluk agama tidak memandang agama orang lain dari sudut pandangnya sendiri dan tidak mencampuri urusan internal agama lain.
5. Setiap pemeluk agama menerima dan menghormati persamaan dan perbedaan masing-masing agama dan tidak mencampuri wilayah doktrin, akidah, keyakinan dan praktik peribadatan agama lain.
6. Setiap pemeluk agama berkomitmen bahwa kerukunan antarumat beragama tidak menghalangi penyiaran agama, dan penyiaran agama tidak menggangu kerukunan antar umat beragama.

Pela Gandong, sumber foto: Kompas

1 PELA GANDONG (MALUKU)

Tradisi-tradisi kerukunan antarumat beragama di Indonesia tersebar di berbagai daerah, misalnya di Maluku kita mengenal tradisi kerukunan umat beragama yang disebut *pela gandong. Pela* berarti suatu ikatan bersatu, sedangkan *gandong* berarti bersama atau bersaudara. Jadi *pela gandong* adalah suatu ikatan persatuan di antara saudara. *Pela gandong* tradisi yang telah lama ada di Maluku, dan biasanya dilakukan oleh dua negeri yang penduduk mayoritasnya berlainan agama. Misalnya antara Negeri Kailolo (Islam) dan Negeri Tihulale (Kristen) yang berada di kabupaten Maluku Tengah.

Lewat *pela gandong* hubungan keakraban dan persaudaraan diperlihatkan oleh kedua negeri itu. Pada saat warga Kailolo sedang membangun sebuah masjid, Negeri Tihulale juga ikut bergotong-royong membantu dalam bentuk sumbangan kayu dan papan untuk pembangunan masjid tersebut. Sebaliknya beberapa tahun kemudian, saat Negeri Tihulale melakukan pembangunan gereja warga Negeri Kailolo pun membantu menyumbang keramik. Tradisi ini juga berlangsung di negeri-negeri lain yang ada di Maluku.

GENTENAN (TENGGER)

Tradisi kerukunan umat beragama juga dapat ditemukan di Desa Ngadas yang terletak di Tengger. Desa yang terletak di tengah Taman Nasional Bromo ini masyarakatnya memeluk agama Islam, Buddha, dan Hindu. Masyarakat Ngadas menjalankan adat dan budaya Tengger yang disebut tradisi *gentenan*, yaitu saling berbagi bantuan, Bantuan tersebut dapat berupa bantuan tenaga, uang atau barang. Pada saat orang yang membantu tersebut memiliki hajatan atau pekerjaan, maka tetangga yang tadinya telah dibantu akan *gentenan* (berganti) membantu, demikian seterusnya.

Tradisi *gentenan* juga ditunjukkan dalam bentuk kesediaan untuk memenuhi undangan hajatan dari orang lain, membagi makanan yang disebut *ater-ater* (bingkisan), dan juga saat membangun rumah ibadah misalnya dalam pembangunan masjid di dusun Ngadas yang turut bergotong-royong tidak hanya umat Islam saja, tetapi umat Buddha dan Hindu pun turut membantu. Sebaliknya pula, pada saat pembangunan wihara dan pura, umat Islam pun turut membantu dalam proses pembangunannya.

Upacara adat Tengger.
Sumber foto: Ana Sopanah.

3 SOLOR WETAN LEMA (NTT)

Tradisi kerukunan antar umat beragama juga dapat ditemukan di daerah Lamaholot NTT atau yang dikenal dengan sebutan "solor watan lema". Warga Solor Watan Lema merupakan keturunan China-Jawa-Malaka tersebar di Flores Timur daratan, Pulau Adonara, Lembata, Solor dan Alor dengan latar belakang agama yang berbeda-beda, yakni Katolik, Kristen Protestan dan Islam.

Nilai-nilai religius yang dibawa oleh agama masing-masing, membentuk warisan tradisi Lamaholot yang disebut *"hulen baat tongabelolo, rera wulan tanah ekan"* (yakin akan pencipta langit dan bumi) serta keyakinan tentang *lewotanah* (kampung halaman). Orang Lamaholot terbiasa menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta toleransi antar umat beragama dan antaragama di lingkungannya, karenanya memiliki kebiasaan merayakan hari-hari besar agama secara bersama-sama. Saat perayaan Natal atau Paskah, umat muslim selalu turut dalam panitia Natal bersama. Begitupun sebaliknya jika hari raya Idul Fitri, umat Kristiani juga turur dalam panitia halalbihalal. Acara bersama akan dilanjutkan dengan makan bersama. Tradisi ini sudah lama berlangsung dan tetap dipertahankan oleh orang Lamaholot sampai detik ini.

Iring-iringan perempuan Sasak membawa dulang berisi ketupat. Sumber foto: Kamia Septia.

4 PERANG TOPHAT (LOMBOK)

Tradisi kerukunan antarumat beragama dirayakan oleh umat Islam dan Hindu di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam bentuk *perang tophat.* Perayaan ini dilakukan oleh warga yang sudah terbagi menjadi dua kubu, yaitu umat Islam dan umat Hindu. Dimulai dengan arak-arakan *kebon odeq* (kebun kecil) berisi hasil bumi dan *tophat* (ketupat) berkeliling bangunan *kemaliq* di dalam kompleks Pura Lingsar, kemudian kedua kubu akan saling melempar ketupat yang sebelumnya sudah diarak, seolah sedang berperang.

Perang thopat, selain menjadi simbol perdamaian dan keharmonisan antarumat beragama di Lombok, juga dijadikan ritual untuk meminta hujan bagi para petani di Lombok. Seusai perang, tophat-tophat yang sudah dilempar akan ditebarkan ke sawah, ladang dan pepohonan untuk mendatangkan kesuburan.

kiri
Tradisi Perang Tophat.
Sumber foto:www.tourbalilombok.com
kanan
Perang Tophat.
Sumber foto: www.nasionalisme.co

NGALIWET (GARUT)

Warga Parakan Muncang Desa Sukamukti, Kabupaten Garut, memiliki tradisi Ngaliwet antara warganya yang beragama Islam dan Kristen. Tradisi Ngaliwet adalah tradisi saling memberikan makanan. Saat Idul Fitri umat Nasrani ikut ngaliwet bareng dengan yang Muslim. Begitupun saat Natal, warga Muslim juga ikut 'ngaliwet' bersama warga Kristen. "Hidup rukun, tanpa membesar-besarkan perbedaan", Warga Kampung Parakan Muncang.

Suasana rukun di Parakan Muncang sudah tercipta sejak lama, terlihat dari bangunan masjid dan gereja yang berdiri bersebelahan, yang dibangun pada 1930-an. Umat Islam dan Kristen juga kerap saling meminjamkan barang untuk keperluan tempat ibadah masing-masing. Saat masjid belum memiliki mimbar, umat Nasrani meminjamkan mimbar milik gereja. Sebaliknya, saat umat Nasrani membutuhkan pengeras suara, umat Muslim ganti meminjamkannya. Jika ada acara keagamaan yang bersamaan waktunya, umat Muslim dipersilakan berkegiatan lebih dulu di masjid, baru setelah itu dilakukan kebaktian di gereja.

Sikap demokratis juga menjadi ciri khas keluarga di Kampung Parakan Muncang. Setiap orangtua memberikan kebebasan kepada anaknya untuk memeluk agama yang diyakini. Perbedaan agama di dalam keluarga terus terjadi turun-temurun hingga sekarang. Meski demikian, pertalian darah di antara mereka memunculkan kesadaran untuk menjaga kerukunan hidup. Sesuai pesan nenek moyang yaitu persaudaraan harus tetap utuh, jangan dibeda-bedakan.

MONUNTUL (SULAWESI UTARA)

Tradisi kerukunan beragama juga dapat ditemukan di Kotamobagu, Sulawesi Utara. Tradisi Monuntul atau malam pasang lampu miyak botol. Monuntul berasal dari kata *tuntul* yang berarti alat penerangan. Tradisi ini berbentuk pemasangan lampu yang dilakukan selama tiga malam berturut-turut dan akan berakhir saat malam takbir. Jadi Monuntul diartikan memberi penerangan. Monuntul dilaksanakan untuk menyambut perayaan Idul Fitri dan kemenangan atas umat muslim yang telah berpuasa selama sebulan.

Monuntul biasanya dilakukan umat muslim untuk menyambut hari kemenangan atau Idul Fitri. Tapi, tradisi ini bukan hanya dilakukan umat Muslim saja melainkan juga penduduk yang beragama lain. Tradisi yang masih terus dipertahankan secara turun-temurun, sejak awal penyebaran agama Islam di Bolaang Mongondow, karena adanya kepercayaan bahwa cahaya merupakan sumber kehidupan. Memasang lampu sama dengan memberikan cahaya penerang dalam kehidupan.

Lomba Monuntul Kotamobagu. Sumber foto: www.suarabagus.com

Tradisi Ngejot Bali. Sumber foto: www.tribunews.com

7 NGEJOT (BALI)
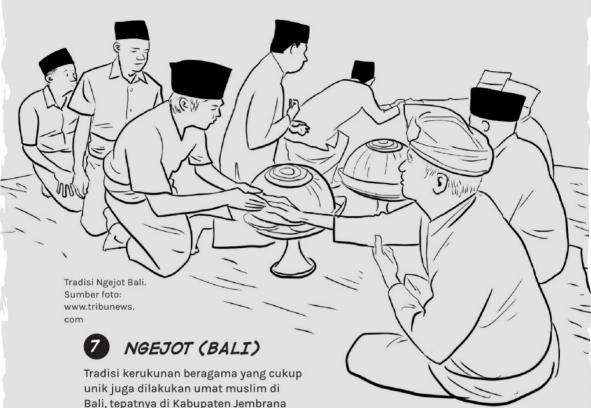
Tradisi kerukunan beragama yang cukup unik juga dilakukan umat muslim di Bali, tepatnya di Kabupaten Jembrana saat hari raya Idul Adha. Umat muslim di Jembrana masih melestarikan tradisi Ngejot, sebagai salah satu bentuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Bali. Tradisi tersebut dilaksanakan di Masjid Raya Negara. Selain di Jembrana tradisi itu juga dilakukan oleh umat Islam di Desa Pegayaman, Kabupaten Buleleng. Desa ini merupakan salah satu kawasan di Bali yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Ngejot adalah tradisi memberikan makanan kepada tetangga sebagai rasa terima kasih. Tak hanya sesama muslim, mereka memberikan makanan itu kepada tetangga yang beragama Hindu, Nasrani, dan lainnya. Tradisi ini sudah turun temurun dilakukan dan masih terpelihara hingga kini, baik dalam masyarakat Hindu maupun Islam, khususnya di daerah pedesaan. Inilah potret toleransi antar-umat beragama di Pulau Dewata.

8 MARJAMBAR (SUMATERA UATARA)

Tradisi kerukunan beragama lainnya juga bisa ditemukan pada tradisi Marjambar. Kata "marjambar" berasal dari bahasa Batak yang berarti *saling berbagi* atau *saling memberikan satu sama lainnya secara bergantian.* Di wilayah Kecamatan Sipirok tradisi Marjambar sudah dikenal sejak lama. Marjambar ditandai dengan saling memberikan makanan pada hari raya keagamaan, makanan tersebut disuguhkan atau diantarkan langsung ke tetangga atau keluarga yang berlainan keyakinan.

Tradisi ini dilakukan pada setiap perayaan hari besar kegamaan, terutama saat Lebaran dan Natal serta tahun Baru. Setiap warga yang hendak merayakan hari besar keagamaannya akan mendatangi kerabat yang beragama lain dengan membawa makanan.

WUJUD-WUJUD KOMUNITAS

(LSM DAN RELAWAN PENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA)
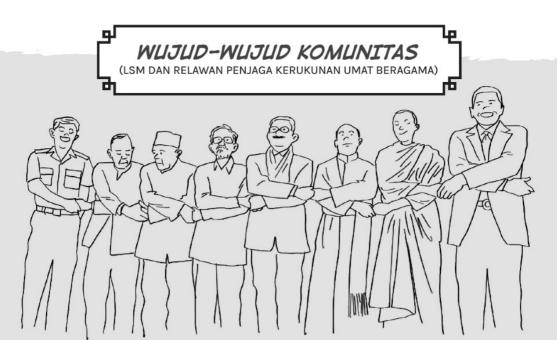
Kerukunan umat beragama. Sumber foto: www.liputan6.com

Di dalam negara yang demokratis terdapat tiga pilar penopang utama yang bersifat saling mengisi dan mendukung demokrasi, yaitu, pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sebagai salah satu wujud dari pilar ketiga, yakni masyarakat sipil yang berdaya, kini semakin diperlukan untuk pemberdayaan masyarakat sekaligus menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari indikator jumlah LSM yang terus bertambah. Menurut data BPS pada tahun 2004, jumlah LSM bertambah menjadi sekitar 70.000 LSM. Secara etimologis, LSM adalah organisasi yang melakukan pemberdayaan masyarakat.

Hubungan LSM dan pemerintah, LSM berfungsi sebagai penyeimbang dan penekan terhadap kebijakan pemerintah. Karakter ini ini merupakan ciri utama LSM yang berfokus pada Kerukunan Umat Beragama dan Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya yang dimaksud sebagai Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.

KATEGORI LSM :

LSM yang terlibat dalam kegiatan natural sosial dan berorientasi karikatif.

LSM yang berorientasi perubahan dan pembangunan masyarakat serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

LSM yang melakukan pembelaan. LSM advokasi melihat masalah yang dihadapi masyarakat tidak hanya bersumber dari mereka sendiri, tetapi juga tidak terlepas dari struktur yang dipaksakan dari luar.

Beberapa LSM yang dalam program kerjanya banyak berfokus pada masalah kerukunan umat beragama di antaranya adalah: The WAHID Institute, SETARA Institute, dan ICRP. Ketiga LSM tersebut termasuk LSM yang cukup konsisten di bidang ini, hal tersebut dapat dilihat dari adanya penerbitan Laporan Tahunan Kehidupan Beragama secara berkala oleh LSM-LSM tersebut.

The WAHID Institute didirikan pada tanggal 7 September 2004 di Jakarta. Visi yang diusung WI adalah untuk mewujudkan prinsip-prinsip dan cita-cita intelektual Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk membangun pemikiran Islam moderat yang mendorong terciptanya demokrasi, pluralisme agama-agama, multikulturalisme dan toleransi di kalangan kaum Muslim di Indonesia dan seluruh dunia. Sedangkan misi yang diembannya adalah menyebarkan gagasan Muslim progresif yang mengedepankan toleransi dan saling pengertian di masyarakat dunia Islam dan Barat.

YENNY WAHID (WAHID INSTITUTE)

The WAHID Institute
Seeding Plural and Peaceful Islam

HENDARDI (SETARA INSTITUTE)

SETARA Institute didirikan pada 2006 dan didedikasikan bagi pencapaian cita-cita di mana setiap orang diperlakukan setara dengan menghormati keberagaman, mengutamakan solidaritas, dan bertujuan memuliakan manusia.

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) adalah sebuah organisasi berbadan hukum yayasan yang bersifat non-sektarian, non-profit, non-pemerintah dan independen yang bergerak di bidang *interfaith* dan dialog agama-agama. Kelahirannya dibidani oleh para tokoh antar agama, ICRP berusaha menyebarkan tradisi dialog dalam pengembangan kehidupan keberagamaan yang humanis dan pluralis di Tanah Air.

Asia Conference of Relegius for Peace II. Sumber foto: www.iro.unim.ac.id

Lintas Agama. Sumber foto: www. merdeka.com
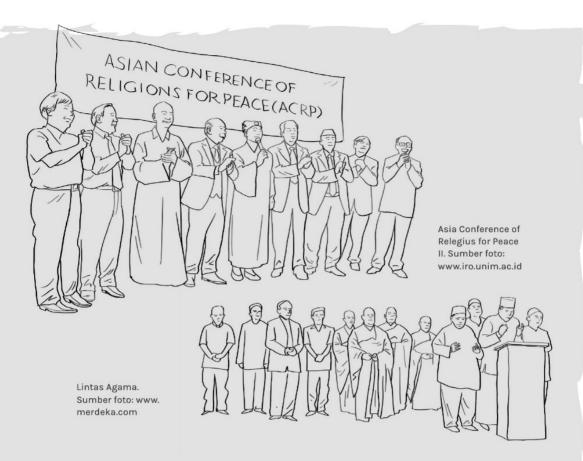
Di samping ketiga LSM tersebut, terdapat juga beberapa LSM yang berkerjasama dengan pemerintah di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama. Contoh kerjasama itu di antaranya adalah yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Badan Litbang dan Diklat dan Pusat Kerukunan Umat Beragama) dengan sejumlah ormas dan LSM dalam menyosialisasikan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan beragama Pemberdayaan FUB dan pendirian rumah ibadah.

The WAHID Institute dan SETARA Institute, dalam kegiatannya juga kerap mengundang wakil pemerintah sebagai peserta dan narasumber.

Menag di acara ICRP. Sumber foto: www.kemenag.go.id

DISKUSI NABILA DAN IQBAL TERUS BERLANJUT HINGGA KE TOPIK PLURALIS

KAK, BAGAIMANAKAH PANDANGAN ISLAM MENGENAI KEMAJEMUKAN DI NEGARA KITA?

CONTOH KEBESARAN ISLAM SEBAGAI AGAMA DAPAT TERLIHAT DARI BAGAIMANA ISLAM DI INDONESIA MEMANDANG KEMAJEMUKAN

IYA KAK, KENYATAANNYA, INDONESIA TERDIRI DARI MULTI ETNIK DAN BERAGAM BUDAYA, KENAPA SIH MASIH ADA KALANGAN YANG MEMAKSAKAN KEHENDAK YA?

SEBAGAI BUKTI BAHWA ISLAM DI INDONESIA AKTIF MENJAGA DAN MEMELIHARA KEMAJEMUKAN, BANYAK TOKOH-TOKOH ISLAM DI INDONESIA YANG MENGANJURKAN SIKAP PLURALIS, ARTINYA MENGHARGAI DAN MENGHORMATI KEMAJEMUKAN

NAH TAPI BAGAIMANA DENGAN SIKAP SEBAGIAN MASYARAKAT YANG MASIH CURIGA DENGAN SIKAP-SIKAP PLURALIS, KAK? BAHKAN SEBAGIAN TOKOH-TOKOH ISLAM PLURALIS DI INDONESIA KERAP DITOLAK?

SIKAP PLURALIS TIDAK BISA LEPAS DARI KENYATAAN BAHWA DI INDONESIA KEHIDUPAN BERSAMA PENUH DENGAN KEKAYAAN DAN PERBEDAAN BUDAYA. DI INDONESIA ADA SEKITAR 130 KELOMPOK ETNIK JADI TOKOH-TOKOH ISLAM YANG PLURALIS BERUSAHA MEMELIHARA KONDISI DI MANA SEMUA KELOMPOK BAIK MINORITAS MAUPUN MAYORITAS DAPAT SECARA PENUH TURUT BERPARTISIPASI DALAM HIDUP BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA KARENA ADANYA PENGHARGAAN TERHADAP PERBEDAAN.

TOKOH-TOKOH PLURALISME

Para tokoh Islam secara konsisten melanjutkan apa yang telah dilakukan para pendiri negeri ini, yaitu mencegah kemungkinan terdistorsinya nilai-nilai kemajemukan ketika perbedaan tidak lagi dihargai dan terpinggirkan. Bermodalkan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang di dalamnya tersirat sebuah kepastian untuk menyadari akan adanya yang lain (*the others*), dan kesadaran ini bersifat *dasariah* dan nasional. Maka tokoh-tokoh Islam seperti Gus Dur, Nurcholish Madjid, Emha Ainun Nadjib dan tokoh-tokoh lainnya, begitu tegar mempromosikan pluralisme di Indonesia.

Terdapat tiga faktor yang mendasari tindakan mereka yaitu pertama, keyakinannya pada nilai-nilai universal dalam Islam yang menjamin hak-hak semua warga negara. Kedua, menjunjung tinggi nilai kosmopolitan bahwa semua individu dan kelompok dalam sebuah negara memiliki tempatnya sendiri, dan paksaan kelompok mayoritas adalah sebuah malapetaka bagi pluralisme dan demokrasi. Ketiga, meyakini dan mengakui akan adanya perbedaan dengan tulus, merupakan faktor yang membuatnya memiliki integritas lintas etnik, agama, ras, dan golongan.

Ketiga nilai utama ini perlu diteruskan oleh para pemimpin umat, partai politik dan pemerintah, jika masih menghendaki Indonesia tetap sebagai sebuah negara majemuk. Tanpa penghargaan terhadap pluralisme, demokrasi hanyalah khayalan bernegara semata.

Diskusi Kader Nasional HMI.
Sumber foto: www.solichinnmimewsonline.blogspot.com

1 NURCHOLISH MADJID

Nurcholish Madjid lahir pada 17 Maret 1939, di Desa Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur. Desa ini memiliki dinamika keagamaan yang istimewa karena penghuninya meletakkan pendidikan pada posisi yang utama. Mayoritas penduduk Jombang adalah santri muslim, dengan tradisi tarekat (sufisme) yang kuat dan secara otomatis menjadi bagian alami dari diri Nurcholish. Orangtua Nurcholish datang dari lingkungan Nahdlatul Ulama dan Masyumi.

Pandangan hidup, pribadi, dan pikiran Nurcholish terbentuk pada masa remaja ketika bersekolah di pondok modern Gontor. Pesantren ini sangat progresif dan modern, dalam metode pengajaran maupun gaya hidup para santrinya. Santri diperbolehkan main musik dan mengenakan celana, bukannya sarung. Kurikulum di Gontor juga mengkombinasikan kajian Islam dan sekular dengan metode pengajaran modern menggunakan pengantar bahasa Arab dan Inggris.

Selepas Gontor, Nurcholish pergi ke Jakarta untuk melanjutkan pelajaran di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah). Dia memilih Fakultas Adab (sastra dan peradaban) dan memperoleh gelar sarjana pada 1968. Dengan skripsi berjudul: "Al Quran: Arab dalam Kata, Universal dalam Makna". Selama menjadi mahasiswa di IAIN, Nurcholish sering mendengar khotbah jumat di Masjid Al Azhar, Jakarta. Khatib favoritnya adalah Buya Hamka. Melalui Hamka dia diperkenalkan pada gagasan Ibn. Taimiyah, yang kelak akan menjadi subjek disertasi doktornya di Universitas Chicago, Amerika Serikat: "Ibn. Taymiyya Onkalam and Falsafa: A Problem of Reason and Revelation in Islam".

BUYA HAMKA

Aktivis di HMI.
Sumber foto: www.solichinnmimewsonline.blogspot.com

Aktivis di HMI. Sumber foto: www.solichinnmimewsonline.blogspot.com

Pada 1963, Nurcholish mulai terlibat dalam kegiatan mahasiswa dengan bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hingga terpilih menjadi ketua umum untuk masa jabatan dua tahun, juga sebagai asisten Sekjen dan Pendiri International Islamic Federation of Students Organizations 1968-1971 sehingga berkesempatan pergi ke luar negeri: ke Amerika Serikat, Mesir, Saudi Arabia, dan Suriah. Menurut Nurcholish, perjalanan ke Timur Tengah membuat dia yakin bahwa pembaruan drastis dalam pemikiran Islam sangat dibutuhkan. Pada 1969, Nurcholish membuat *booklet* berjudul Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP), yang dikenal pula sebagai panduan orientasi ideologis anggota HMI dan juga diterima di kalangan intelektual muda Islam di luar HMI.

Pada 1965, terjadi perubahan besar dalam politik Indonesia, yang membawa perbaikan ekonomi Indonesia sekaligus meningkatnya represi terhadap ekspresi politik, khususnya yang berbasis pada Islam. Di tengah situasi seperti itulah, pada Januari 1970, Nurcholish meluncurkan makalah dengan judul "Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat" yang memicu perdebatan riuh di kalangan umat Islam. Kontroversi itu telah melejitkan Nurcholish menjadi tokoh publik.

Jernin & Bemas beropini. Sumber foto: Dwiki Setiyawan.

Nurcholis akrab dengan wartawan. Sumber foto: Dwiki Setiyawan.

Pada awal 1970-an Nurcholish juga menerbitkan artikel di beberapa harian Jakarta. Artikel-artikelnya banyak membahas strategi pembangunan ekonomi di bawah Orde Baru dan menunjukkan empati sosialnya yang besar kepada mereka yang miskin dan rentan. Artikel-artikel itu dibukukan pada tahun 1993 di bawah judul "Islam kerakyatan dan keIndonesiaan". Setelah mendapat gelar doktor dan kembali ke Indonesia pada 1985, banyak teman mendorongnya untuk menyebarkan gagasan ke masyarakat secara lebih luas. Dari sinilah kemudian Paramadina didirikan.

Demokratisasi merupakan tema penting dalam debat nasional sepanjang 1990-an. Pada periode ini Nurcholish menjadi kontributor tetap di berbagai harian dan majalah, mendiskusikan berbagai tema dari iman, budaya hingga moral dalam politik muslim kontemporer. Artikel pendek dan mudah dicerna ini, kemudian dibukukan dengan judul "Pintu-Pintu Menuju Tuhan" (1994) jawaban kritik bahwa tulisan Nurcholish terlalu akademis dan sulit dipahami publik awam. Pada waktu yang bersamaan Paramadina menerbitkan buku lain Nurcholish, "Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah". Buku ini berisi makalah Klub Kajian Agama (KAA) Paramadina sejak awal 1990-an, mendiskusikan berbagai subjek, termasuk Neo-Sufisme. Buku dengan judul hampir sama, "Islam Doktrin dan Peradaban" (1992) menjadi bukunya yang paling diminati.

Penyerahan HMI Award, sumber foto: Dwiki Setiyawan

Nurcholish sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Sumber foto: Dwiki Setiyawan.

Merenungkan peradaban Islam kian mendalam mendorong Nurcholish untuk mencari landasan kerjasama antar-agama. Pada akhir 1992 dia kembali membuat pidato yang isinya diperdebatkan secara luas: "Kehidupan keagamaan di Indonesia untuk generasi mendatang. Nurcholish berbicara tentang agama secara umum, tidak hanya Islam. Dia juga bicara soal agama yang inklusif dan universal, serta menekankan pencarian kesamaan platform antaragama. Melawan diam-diam batas keterbukaan politik Suharto, Nurcholish juga terus terlibat dalam debat publik pada 1990-an, mendorong keterbukaan, dan kemungkinan kritik publik dalam pembetukan masyarakat demokratis. Pada masa ini Nurcholish menulis sebuah artikel penting berjudul "Islamic roots of modern pluralism, Indonesian experience".

Kumpulan tulisan Nurcholish yang berisi tanggapan terhadap meningkatnya polarisasi agama dalam politik Indonesia, juga tentang humanisme, keadilan dan hak asasi manusia terbit pada 1995 di bawah judul "Islam Agama Kemanusiaan". Tak heran ketika badai demonstrasi mahasiswa melanda Indonesia pada 1997, menuntut mundurnya Suharto, Nurcholish menjadi tempat orang untuk mencari panduan. Setelah Suharto jatuh, Nurcholish ikut terlibat mendorong demokratisasi dengan antara lain menjadi ketua Komite Pemberdayaan Pemilih (KPP) untuk pemilihan umum 1999. Sebuah era baru demokratisasi di Indonesia, salah satu buah perjuangan Nurcholish Madjid.

2 GUS DUR

Mantan Presiden ke-4 Indonesia ini lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 dari pasangan Wahid Hasyim dan Solichah. Lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil atau "sang penakluk", kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada anak kiai. Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara, dari keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya, K.H. Hasyim Asyari, adalah pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sementara kakek dari pihak ibu, K.H. Bisrisyansuri, adalah pengajar pesantren. Ayah Gus Dur, K.H. Wahid Hasyim, terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi menteri agama pada 1949. Ibunya, Hj. Sholehah, adalah putri pendiri pondok pesantren Denanyar Jombang. Sejak awal Gus Dur dididik secara modern dan pluralis, selain diajarkan membaca berbagai buku untuk memperluas pengetahuannya,

Pada 1959, Gus Dur pindah ke pesantren Tambak Beras di Jombang dan mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai guru dan kepala madrasah. Gus Dur juga menjadi wartawan Horizon dan Majalah Budaya Jaya. Pada 1963, Gus Dur menerima beasiswa dari Departemen Agama untuk belajar di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir. Gus Dur lalu belajar di Universitas Baghdad dan menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970. Kemudian dia pergi ke Universitas Leiden, Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Gus Dur kemudian bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), organisasi yg terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat. LP3ES mendirikan majalah Prisma di mana Gus Dur menjadi salah satu kontributor utama. Akhirnya Gus Dur memilih mengembangkan pesantren

Gus Dur menulis. Sumber foto: A. Muthalib (Tempo).

Foto Gus Dur.
Sumber foto: www.
narasukhe.blogspot.
com

sambil meneruskan kariernya sebagai jurnalis, menulis untuk Tempo dan Kompas. Artikelnya diterima baik dan memberinya reputasi sebagai komentator sosial.

Abdurrahman Wahid mendapat pengalaman politik pertamanya pada pemilihan umum legislatif 1982, saat berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Salah satu hal yang dilakukan Gus Dur pada saat menjalankan NU adalah melakukan reformasi di dalam NU. Untuk itu NU membentuk Tim Tujuh (termasuk Gus Dur) untuk mengerjakan isu reformasi dan membantu menghidupkan kembali NU. Pada 1983, Suharto dipilih kembali sebagai Presiden untuk masa jabatan keempat oleh MPR dan mulai mengambil langkah menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Dari Juni 1983 hingga Oktober 1983, Gus Dur menjadi bagian dari kelompok yang ditugaskan untuk menyiapkan respon NU terhadap isu ini. Gus Dur lalu menyimpulkan NU harus menerima Pancasila sebagai ideologi negara.

Gus Dur dan Kardinal Tauran. Sumber foto: www.wahidinstitute.org

Gus Dur mengundurkan diri dari PPP agar NU dapat memfokuskan pada masalah sosial. Pada musyawarah nasional NU 1984, Gus Dur dinominasikan sebagai ketua PBNU dan menerimanya dengan syarat mendapat wewenang penuh untuk memilih yang akan bekerja di bawahnya. Terpilihnya Gus Dur dilihat positif oleh Suharto. Penerimaan Gus Dur terhadap Pancasila bersamaan dengan sikap moderatnya menjadikannya dekat dengan pemerintah. Kedekatan Gus Dur kemudian mengantarnya menjadi anggota MPR dari Golkar. Meskipun demikian, Gus Dur acap mengkritik pemerintah, di antaranya proyek Waduk Kedung Ombo yang didanai bank dunia. Selama masa jabatan pertamanya, Gus Dur fokus mereformasi sistem pendidikan pesantren dan berhasil meningkatkan kualitas sistem pendidikan pesantren sehingga menandingi sekolah sekuler. Gus Dur terpilih kembali untuk masa jabatan kedua ketua PBNU pada musyawarah nasional 1989.

Konflik Gus Dur dengan Orde Baru akhirnya terjadi pada Maret 1992, ketika Gus Dur berencana mengadakan musyawarah besar untuk merayakan ulang tahun NU ke-66 dan merencanakan acara itu dihadiri paling sedikit satu juta anggota NU.

Salah satu dampak jatuhnya Suharto adalah lahirnya partai politik baru, dan pada Juni 1998, komunitas NU meminta Gus Dur membentuk partai politik baru. Gus Dur menanggapi ide dengan mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada 7 Februari 1999, PKB resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat presidennya. Pada Pemilu April 1999, PKB memperoleh 12% suara sementara PDIP yang lebih populer memperoleh 33% suara.

Budayawan Cak Nun.
Sumber foto: Islam Indonesia.
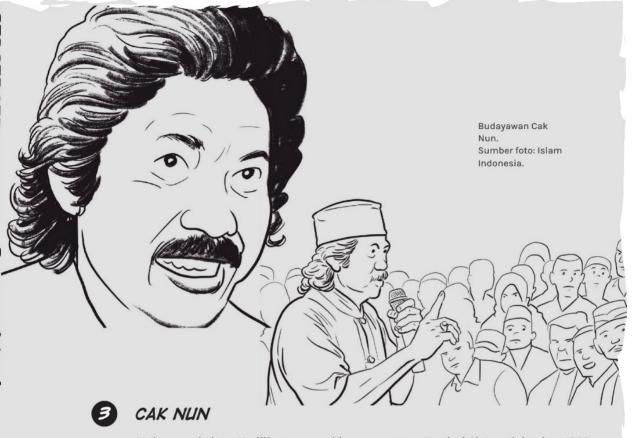
3 CAK NUN

Muhammad Ainun Nadjib atau yang biasa dikenal dengan nama Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun lahir di Jombang, Jawa Timur, 27 Mei 1953 mengenyam pendidikan SD di Jombang (1965) dan SMP Muhammadiyah di Yogyakarta (1968). Kemudian masuk pondok modern Gontor Ponorogo tapi dikeluarkan karena melakukan demo melawan pemerintah pada pertengahan tahun ketiga studinya. Kemudian sempat kuliah di Fakultas Ekonomi UGM. Selama di Yogya sempat hidup menggelandang di Malioboro, Yogyakarta antara 1970-1975 dan belajar sastra kepada Umbu Landu Paranggi, seorang sufi yang sangat mempengaruhi Emha. Emha juga mengikuti berbagai peristiwa kesenian internasional.

Di samping aktivitas rutin bulanan dengan komunitas masyarakat Padhang Mbulan, ia juga berkeliling ke berbagai wilayah Nusantara, bersama musik Kiai Kanjeng, Selain itu ia juga menyelenggarakan acara tetap Kenduri Cinta sejak tahun 1990-an di Taman Ismail Marzuki. Kenduri cinta adalah forum silaturahmi budaya dan kemanusiaan yang dikemas sangat terbuka, nonpartisan, ringan dan dibalut dalam gelar kesenian lintas gender. Dalam pertemuan-pertemuan sosial itu ia melakukan berbagai dekonstruksi pemahaman atas nilai-nilai, pola-pola komunikasi, metoda perhubungan kultural, pendidikan cara berpikir, serta pengupayaan solusi-solusi masalah

Kenduri Cinta. Sumber foto: www.kenduricinta.com

Dalam berbagai forum komunitas masyarakat Padang Bulan, pembicaraan mengenai pluralisme sering muncul. Berkali-kali Cak Nun meluruskan pemahaman mengenai konsep yang ia sebut sebagai manajemen keberagaman itu.

Kariernya diawali sebagai pengasuh ruang sastra di harian masa kini, Yogyakarta (1970). Kemudian menjadi wartawan/ redaktur di harian *Masa Kini*, Yogyakarta (1973-1976), sebelum menjadi pemimpin Teater Dinasti (Yogyakarta), dan grup musik Kiai Kanjeng hingga kini.

Perihal pluralisme, sering muncul dalam diskusi Cak Nun bersama komunitasnya. "Ada apa dengan pluralisme?" Katanya. Menurut dia, sejak zaman kerajaan Majapahit tidak pernah ada masalah dengan pluralisme. Sejak zaman nenek moyang, bangsa ini sudah plural dan bisa hidup rukun. Mungkin sekarang ada intervensi dari negara luar, ujar Emha. Dia dengan tegas menyatakan mendukung pluralisme. Menurutnya, pluralisme bukan menganggap semua agama itu sama. "Islam beda dengan Kristen, dengan Buddha, dengan Katolik, dengan Hindu. Tidak bisa disamakan, yang beda biar berbeda. Kita harus menghargai itu semua," tutur budayawan intelektual itu.

Cak Nun dalam forum. Sumber foto: www.adilsusila.blogspot.com

Luhut & Cak Nun. Sumber foto: www.istanapos.com

AKOMODASI POLITIK KEAGAMAAN

Kantor Kementrian Agama.
Sumber foto: www.bpkh.go.id
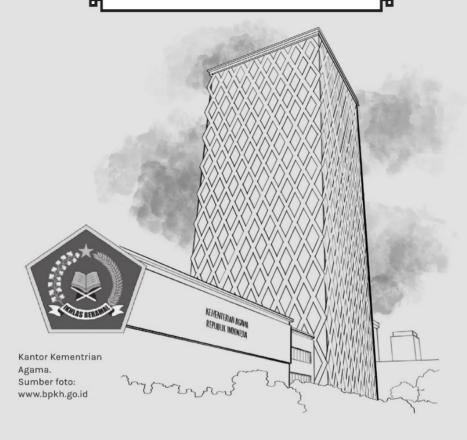
Kementrian Agama dibentuk pada 3 Januari 1946, berdasarkan Keputusan Presiden No. 1 / SD / 1946. Banyak pengamat yakin ditujukan untuk meredam kalangan politikus Islam yang tidak puas dengan penghilangan istilah Piagam Jakarta dan Islam dari UUD 1945. Walau asumsi ini mengandung kebenaran, tetapi faktanya alasan pembentukan Kementrian Agama ternyata jauh lebih kompleks. Sesuai fakta historis, inisiatif untuk mendirikan lembaga negara yang mengurusi administrasi agama Islam sebenarnya pertama kali diusulkan oleh Muhammad Yamin, pada sesi kedua rapat BPUPK pada 11 Juni 1945. Muhammad Yamin mengusulkan dibentuknya sebuah lembaga yang fungsinya mirip dengan lembaga bentukan Belanda yang mengurusi urusan agama Islam bernama Het Kantoor voor Inlandsche Zaken (Kantor Penasihat untuk Urusan Penduduk Pribumi dan Islam) yang tugasnya memberikan saran kepada pemerintah mengenai kebijakan untuk Masyarakat Islam.

Usulan pembentukan Kementrian Agama kemudian muncul kembali segera setelah tujuh kata di Piagam Jakarta dicabut dari Konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945, kali ini usulan tersebut diusung oleh Ahmad Subardjo yang menyuarakannya dalam pertemuan PPKI pada 19 Agustus 1945, dengan penekanan bahwa lembaga itu akan berfungsi sebagai badan penghubung antara pemerintah dan komunitas Muslim. Namun demikian, usulan tersebut mendapat tentangan sengit dari anggota PPKI lainnya, seperti Latuharhary, Ki Hadjar Dewantara dan Kusumasumantri, karena berbagai alasan usulan tersebut gagal mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota PPKI.

Pasal 156

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Upaya lebih lanjut untuk mengusung konsep Kementrian Agama muncul lagi pada akhir November 1945, dalam pertemuan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Kali ini, upaya tersebut berhasil karena pemerintah memberikan dukungan bagi pembentukan Kementrian Agama. Perubahan sikap pemerintah tentu bukan kebetulan tetapi karena dipengaruhi oleh pergeseran sistem politik dari presidensial ke parlementer, sehingga rezim akhirnya mendukung pembentukan Kementrian Agama di 1945.

Usulan baru yang dibuat oleh anggota parlemen Muslim di KNIP untuk pembentukan Kementerian itu tampaknya sejalan dengan realita bahwa Kabinet parlemen pertama yang dipimpin oleh Sjahrir membutuhkan dukungan dari politisi Muslim. Inilah mengapa, dengan dukungan dari Perdana Menteri, Presiden akhirnya menandatangani keputusan untuk membentuk Kementrian Agama.

Mungkin karena alasan politis yang melatar belakangi pembentukannya, maka status yang tepat dari lembaga ini tidak pernah jelas. Di satu sisi, Kementrian Agama berfungsi untuk mewakili kepentingan umat Islam dalam sistem negara. Di sisi lain, ia berfungsi sebagai lembaga pemerintah yang memberikan layanan keagamaan dan untuk mempromosikan ideologi negara di masyarakat. Tugas resmi Kementrian Agama sendiri adalah memenuhi Pasal 29 UUD 1945.

Kontribusi Kementrian Agama untuk kepentingan Muslim semakin membesar setelah penunjukan Muhammad Rasjidi sebagai Menteri pertamanya pada tahun 1946. Di bawah kepemimpinannya berbagai urusan Islam dimasukkan ke bawah administrasi Kementrian Agama. Berdasarkan Keputusan Pemerintah Maret 1946. Kementrian Agama mengambil kendali administrasi yang terkait dengan Islam yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri yaitu administrasi pernikahan Islam, pengadilan Islam, masjid dan ziarah; sementara dari Kementerian Kehakiman adalah Pengadilan Tinggi Islam. Sedangkan dari Kementerian Pendidikan, Kementrian Agama mengambil alih pengawasan pengajaran mata pelajaran agama di sekolah umum. Ini adalah model manajemen yang diwarisi dari pemerintah kolonial dalam mengelola agama. Selanjutnya, Rasjidi juga mengeluarkan Maklumat Menteri pada bulan April 1946 untuk mengambil kewenangan yang sebelumnya berada di tangan pejabat pemerintahan lokal (Karesidenan) dan mengalihkannya ke

Pengadilan Agama zaman Belanda di Solo.
Sumber foto: www.buahpeer.com

tangan kepala kantor kementerian agama di daerah (Jawatan Agama Daerah atau Kantor Wilayah Agama) dalam pemilihan dan penunjukan hakim Muslim (penghulu) untuk melakukan upacara pernikahan dan perceraian. Kementrian Agama juga mulai memperbesar kewenangannya dengan memberlakukan UU No. 22/1946 tentang pernikahan Islam. Di bawah Fathurrahman Kafrawi, Kementrian Agama memberlakukan hukum Islam pertama yang dikeluarkan setelah Indonesia Merdeka. Undang-undang tersebut mengharuskan Muslim untuk mendaftarkan pernikahan, perceraian dan rekonsiliasi di bawah satu sistem administratif. Setelah UU ini, Kafrawi juga menandatangani Keputusan Bersama Menteri dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mempekerjakan kaum (pemimpin agama dalam upacara pernikahan) sebagai pejabat negara dengan gaji rutin dari pemerintah.

Dalam pendidikan, peran Kementrian Agama juga mencakup pengawasan pendidikan agama untuk sekolah umum. Kementrian Agama mengeluarkan peraturan yang mewajibkan sekolah untuk memberikan siswa waktu dua jam per minggu untuk pelajaran agama sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Pemerintah tahun 1951. Sejak saat itu, mata pelajaran agama menjadi wajib untuk semua siswa dalam sistem sekolah negeri, dan mengikuti saran dari Ki Hajar Dewantara, yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada saat itu, Kafrawi mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan semua sekolah Islam (madrasah) untuk mengajarkan ilmu-ilmu modern dan sekuler. Peran yang dilakukan oleh Kementrian Agama dalam urusan agama semakin berkembang pesat setelah diberlakukannya Konstitusi 1950.

Terlepas dari kurangnya kapasitas institusional untuk menerapkan kebijakan dalam praktiknya, keterlibatan kementrian agama dalam urusan komunitas muslim semakin nyata. Ini terjadi dengan penunjukan Muhammad Ilyas sebagai Menteri Agama pada tahun 1958. Di antara 34 tugas yang dilakukan oleh Kementrian Agama, 22 berkaitan dengan memelihara dan memfasilitasi

Jemaah Haji zaman Hindia-Belanda tahun 1880.
Sumber foto: Tropen Museum.
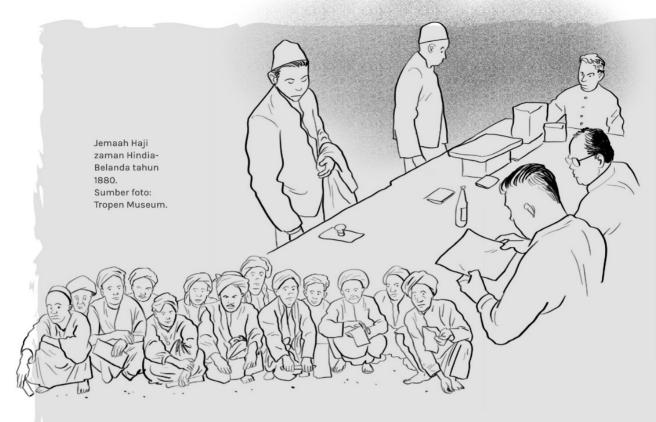
pembangunan institusi Muslim. Kementrian Agama menangani tidak hanya lembaga pendidikan Islam, tetapi juga kegiatan administrasi aset masjid dan keuangannya. Mengatur pengumpulan zakat dan kegiatan amal keagamaan lainnya. Ini juga bertindak sebagai mediator dalam perselisihan antara internal kelompok agama (kemungkinan besar antara tradisionalis dan modernis). Kementrian Agama juga mengelola operasional haji. Pada saat yang sama, Kementrian Agama juga berfungsi sebagai mufti negara, memberikan fatwa (pendapat keagamaan) kepada pemerintah serta memberikan nasehat agama (nasehat atau tausiyah) kepada institusi apa pun yang membutuhkannya. Peran-peran di ataslah yang menyebabkan munculnya kritik keras terhadap keberadaan Kementrian Agama, khususnya di awal 1960-an. Dalam pandangan para pengkritiknya keberadaan Kementerian adalah sarana untuk membuat perawatan lembaga-lembaga keagamaan Islam menjadi tugas-tugas negara, atau untuk mempromosikan Islam sebagai satu-satunya agama resmi negara.

Terlepas dari layanannya kepada komunitas Muslim, Kementrian Agama juga terus terlibat dalam mengelola kehidupan beragama di Indonesia dan berfungsi sebagai lembaga negara untuk mengimplementasikan peraturan tentang agama dalam Konstitusi 1950. Peran semacam itu semakin tertanam setelah pengangkatan Wahid Hasjim sebagai Menteri pada awal 1950-an. Sejak itu ada dua tugas utama yang dilakukan oleh Kementrian Agama. Tugas pertama adalah sebagai institusi pengawas untuk realisasi Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan publik; dan yang kedua adalah tanggung jawabnya untuk mengawasi kebebasan individu, memberikan bimbingan dan dukungan sehingga dapat mempromosikan gerakan keagamaan yang sehat.

Jika kebijakan Kementrian Agama mengenai komunisme hanya ada beberapa, sebaliknya sejumlah kebijakan dikeluarkan untuk menanggapi pertumbuhan aliran kebatinan yang kemudian lebih dikenal

LOGO ALIRAN KEBATHINAN PERJALANAN

Sarasehan daerah penghayat kepercayaan. Sumber foto: Andi Hartik (Kompas).

sebagai aliran kepercayaan. Menurut laporan jumlah kelompok-kelompok ini meningkat menjadi sekitar 360 di Jawa pada tahun 1953, sedangkan di tahun 1952 hanya ada 29 kelompok. Ini dapat menjelaskan mengapa para Menteri Agama selanjutnya (seperti Faqih Usman, Masjkur dan Mohammad Ilyas) memperketat pengawasan terhadap aliran-aliran ini, dan menjadikannya prioritas kementrian agama.

Untuk merespons perluasan aliran kebatinan, kementrian agama mengeluarkan kebijakan dengan menjalin kontak dan memantau gerakan-gerakan atau kelompok-kelompok agama dan sekte-sekte keagamaan lokal yang bukan bagian dari Islam atau Kristen. Kebijakan tersebut ditujukan agar para anggota aliran kebatinan menjadi pemeluk agama-agama "resmi" menurut pemerintah. Karena alasan ini, maka, Menteri menetapkan bagian khusus untuk pengawasan keyakinan yang dikenal dengan nama PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat Masyarakat). Meskipun bagian ini lebih berfungsi sebagai penyedia basis data internal Kementrian Agama dibanding bertindak sebagai badan pengawas, pembentukan PAKEM menjadi tonggak sejarah bagi pengawasan negara lebih lanjut terhadap keyakinan agama di Indonesia. Bagian ini kemudian menjadi unit otonom tahun 1954, berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 167 / Promosi / 1954 pada saat Ali Sastroamidjojo menjabat sebagai Perdana Menteri. Menyusul peningkatan PAKEM menjadi unit otonom di bawah naungan dua kantor kementerian (Kementerian Kehakiman dan Kejaksaan Agung) setahun kemudian, BKKI (Badan Kongres Kebatinan Indonesia) didirikan pada Kongres Nasional Pertama aliran kebatinan pada tanggal 19 dan 20 Desember 1955 di Semarang, Jawa Tengah. Dipimpin oleh seorang politisi terkemuka dan mantan anggota BPUPKI, Mr. Wongsonegoro, BKKI menjadi satu-satunya institusi di mana aktivis kebatinan dapat melakukan negosiasi

Ilustrasi penganut aliran kepercayaan. Sumber foto: www.jawapos.com

Bukan kebetulan bahwa pendirian BKKI dikaitkan dengan suhu politik yang meningkat setelah pemilihan umum pertama pada bulan September 1955.

Selain masalah kebatinan, Kementrian Agama juga meletakan dasar untuk mengatur hubungan negara-agama. Di bawah kebijakan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kementrian Agama mempromosikan perlindungan kebebasan beragama dan berekspresi, tetapi dengan syarat bahwa kebebasan beragama diterapkan dalam situasi penuh kesadaran dan penuh tan

tanggung jawab ini kemudian digunakan sebagai alat yang efektif di bawah Orde Baru untuk membungkam kritik yang menuduh rezim melanggar kebebasan beragama. Tugas penting lain dari Kementrian Agama sejak tahun 1960 adalah perannya sebagai pengawas dalam publikasi keagamaan di Indonesia terutama memantau publikasi asing tentang agama. Selain tugas-tugas di atas, peran kementrian agama lainnya adalah terkait masalah-masalah dukungan dan pengawasan pendirian dan pemeliharaan rumah ibadah. Juga

Sarasehan daerah penghayat kepercayaan. Sumber foto: Dirjen Kebudayaan Kemendikbud.

Kementerian Agama juga berfungsi sebagai badan penasihat bagi pemerintah dalam penyelenggaraan upacara kenegaraan serta memutuskan hari libur keagamaan dan memantau proses pengambilan sumpah pejabat negara yang baru diangkat. Singkatnya jelas bahwa Kementerian Agama memainkan peran utama tidak hanya dalam mengarahkan kebijakan negara untuk mendukung komunitas Muslim tetapi juga dalam menyebarkan penafsiran hegemonik terhadap Sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, berdasarkan norma dan nilai-nilai Muslim. Pada gilirannya Kemente rian Agama juga menggunakan dasar negara sebagai identitas Indonesia berdasarkan agama. Ini membantu mengubah makna Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya menjadi ciri Islam, tetapi juga menjadi satu politik baru yang berfungsi sebagai bagian dari identitas nasional masyarakat Indonesia. Melalui penekanan baru pada idiom tersebut tidak berarti, bahwa peran menyangkut agama yang dimainkan aktivis Muslim menjadi berkurang, pada kenyataannya mereka masih terus mempengaruhi kebijakan negara. Pengaruh ini diwujudkan dengan pemberlakuan Ketetapan Presiden tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama pada pertengahan 1960-an. Kebijakan baru ini pada intinya melihat negara tidak hanya melestarikan identitas nasional tetapi juga melindungi Islam. Kebijakan tersebut adalah peraturan paling penting yang dikeluarkan oleh rezim Demokrasi Terpimpin Presiden Sukarno memiliki dampak luas terhadap praktik-praktik pengelolaan agama oleh negara hingga rezim Orde Baru Suharto.

Proses interogasi anggota PKI. Sumber foto: PKI - Arsip Nasional Belanda.

PENGAKUAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN

Kirab Bhinneka 2017 Solo, Jateng.
Sumber foto: Antara Foto (Maulana Surya).

Hari-hari besar keagamaan di Indonesia memiliki arti dan makna penting dalam kehidupan bangsa dan masyarakat pada umumnya. Agar dapat memahami apa makna dari tiap-tiap hari besar agama tentunya kita harus mengetahui latar belakang sejarahnya. Sebagai penganut sebuah agama kita perlu memperingati hari-hari besar tersebut, karena hal itu diwajibkan oleh praktik dan ritual masing-masing agama. Pada akhirnya peringatan hari besar agama juga dimaksudkan untuk mempertebal rasa kecintaan kita terhadap bangsa dan negara.

Kesadaran akan pentingnya menjaga harmoni yang bersumber dari saling menghormati berasaskan iman dan cinta kasih agama masing-masinglah, yang seharusnya akan menjaga kerukunan beragama. Sebab keyakinan di tiap agama memang pada dasarnya menanamkan cinta kasih, kerukunan, dan demi kemanusiaan.

Di Indonesia perayaan hari besar agama merupakan bagian dari kehidupan para pemeluknya. Peringatan hari-hari besar agama sudah merupakan kebiasaan yang berlangsung lama sebagai sebuah tradisi yang baik. Masyarakat di Indonesia mempunyai kebiasaan mengenang kembali setiap peristiwa atau kejadian penting serta memberi arti atas peristiwa penting itu dalam kehidupannya. Tidak semua peringatan hari-hari besar agama yang berlangsung sejak dahulu hingga sekarang menjadi tradisi atau dirayakan di negara asal agama itu diturunkan.

Tuntunan sikap dan perbuatan yang luhur itu, diwujudkan melalui sikap pengakuan akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia kepada kita. Peringatan keagamaan juga menumbuhkan sikap ramah-tamah, kasih sayang kepada sesama makhluk, serta menjauhkan sikap bermusuhan dan dengki terhadap sesama manusia. Makna memperingati hari besar agama juga mendidik setiap manusia dan anggota masyarakat serta warga negara agar senantiasa ingat kepada kebenaran ajaran agama serta menghormati norma-norma yang berlaku di masyarakat dan negara.

Salah satu contoh bagaimana sikap pemerintah terhadap pengakuan hari-hari besar keagamaan di Indonesia dapat dilihat dari pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam perayaan Isra Miraj di Istana Negara. Di sana wakil presiden menyampaikan bahwa sejumlah hari libur perayaan hari besar agama menjadi simbol harmonisnya hubungan antaragama di Indonesia.

Bagaimana kehidupan beragama dijalankan secara baik, di Indonesia ini dapat dilihat dari adanya 15 hari libur, dimana hari libur nasional hanya terdiri dari 3 yaitu 1 Januari, 1 Mei dan 17 Agustus sedangkan 12 lainnya adalah hari raya agama. Menurut Wapres, sebanyak enam agama di Indonesia yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu memilik hari libur perayaan keagamaannya masing-masing di Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa Islam di Indonesia bersifat moderat.

Sebagai pembanding, meski populasi pemeluk Islam di Perancis sudah hampir 7 persen tetapi pemerintah Prancis tidak memutuskan kebijakan adanya hari raya Islam secara resmi. Begitu juga di Thailand dan Amerika. Wapres menjelaskan Indonesia memperingati tiga hari raya Islam secara kenegaraan di istana yaitu Isra Miraj, Nuzulul Quran dan Idul Adha. " Hal itu sudah berlangsung selama 66 tahun dimulai sejak masa Bung Karno sebagai Presiden pertama pada tahun 50. Hal itu menjadi simbol bahwa agama menjadi faktor penting dalam kenegaraan.

Pengakuan pemerintah terhadap hari besar keagamaan juga tercermin dari kebijakan mengakui perayaan Imlek untuk umat Kong Hu Cu. Walaupun sudah ada di Nusantara selama ratusan tahun, pengakuan resmi dari negara terhadap agama Kong Hu Cu baru diberikan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di tahun 2000. Selain memberikan pengakuan, Gus Dur juga membebaskan masyarakat Kong Hu Cu untuk menjalankan ibadah agamanya secara terbuka dan merayakan hari keagamaan mereka. Fakta ini, menurut Direktur Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Gendro Nurhadi menjadi acuan sebagian besar penganut agama dan kepercayaan asli Indonesia. Mereka ingin, negara mengakui agama dan kepercayaan asli Indonesia, seperti halnya pengakuanyang diberikan terhadap Kong Hu Cu.

Kirab Bhinneka 2017 Solo, Jateng.
Sumber foto: www.pelajaran_sd_ilmu_pengetahuan.blogspot.com

Seperti diketahui selama puluhan tahun, rezim Orde Baru melarang kesenian barongsai dan tradisi Tionghoa lain termasuk agama Kong Hu Cu untuk ditampilkan secara terbuka. Padahal, tradisi Tionghoa sudah masuk ke Indonesia bersamaan dengan migrasi manusia dari wilayah selatan China ke Asia Tenggara termasuk Indonesia sekitar 5.000 tahun lalu. Bahkan, sekolah agama Kong Hu Cu pertama di Jakarta berdiri sejak awal abad ke-17. Dan secara organisasi sudah ada sejak 1901. Sebenarnya, menurut Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat, pemerintah tidak memiliki wewenang memberi pengakuan terhadap sebuah agama termasuk Kong Hu Cu. Untuk kasus agama masyarakat Tionghoa ini, Bahrul menyatakan pemerintah hanya mencabut larangan yang diberlakukan di masa Orde Baru.

DIALOG ANTARUMAT

Dialog antar umat beragama.
Sumber foto: www.nu.or.id

Sebagai negara yang memiliki latar belakang multietnis dan juga multireligi, diperlukan komunikasi antar pemeluk agama sehingga terjadi upaya saling menghormati dan memahami antara pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Untuk itu bentuk komunikasi yang paling baik adalah dengan menggunakan dialog.

Dialog antariman atau *interfaith dialogue* dipahami sebagai dialog antarumat berbeda iman yang dijalankan secara personal maupun secara komunal, sedangkan dialog antaragama merupakan dialog yang dijalankan oleh umat berbeda agama dengan lebih terorganisasi dan secara langsung atau tidak langsung menyangkut institusi agama.

Dialog antarumat beragama di Indonesia sebenarnya sudah terjadi sejak dahulu. Sebab hadirnya agama baru akan bertemu dengan agama yang sudah ada sebelumnya. Perjumpaan itu akan menciptakan dialog pada dataran yang berbeda-beda, bahkan hingga dataran teologis.

Pernyataan bahwa pemeluk Kristen dan Islam hidup rukun dapat dilihat di banyak tempat di Indonesia. Meski begitu, tidak berarti bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antar komunitas agama di Indonesia, sebagian masalah bahkan hingga berujung pada kekerasan, seperti yang dilaporkan dalam Laporan Tahunan 2008 dan 2009 Kehidupan Beragama di Indonesia oleh Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), UGM.

Kekerasan berskala besar seperti yang terjadi di Maluku dan Poso memang saat ini sudah tidak terjadi lagi, namun ketegangan-ketegangan masih terus berlanjut. Persoalan menyangkut pendirian rumah ibadah, misalnya, masih menjadi ganjalan serius dalam hubungan antarkomunitas agama, khususnya Kristiani dengan Muslim. Setiap tahun masih tercatat belasan kasus menyangkut pendirian gereja, dan sebagian berupa kekerasan dalam bentuk penutupan paksa atau bahkan pembongkaran bangunan rumah ibadah. Meskipun pemerintah

Saling menghormati antar umat beragama.
Sumber foto: www.twitter.com/slbooks2012

memperbarui peraturan mengenai pendirian rumah ibadah pada tahun 2006 (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006) untuk memastikan semua warganegara mendapatkan hak beribadahnya, namun penegakan hukum seringkali tidak berjalan dengan baik

Hal tersebut kemudian menjadi indikasi pentingnya terus menjaga dialog yang sehat antarumat beragama di Indonesia. Pentingnya dialog antarumat beragama juga dirasakan penting di tataran internasional baik dari pihak Kristen maupun pihak Islam. Beberapa institusi internasional yang terus mengusahakan dialog antarumat beragama di antaranya adalah *Pontifical Council for Interreligious Dialogue* (PCID). Institusi ini dibentuk oleh Vatikan untuk mendiskusikan hubungan antara gereja Katolik dengan agama-agama dan umat beragama lain, pada 19 Mei 1964. PCID memfokuskan upaya mereka pada kaum Muslim melalui sebuah komisi khusus, dan melalui sebuah publikasi berjudul *Guidelines for a Dialogue between Muslims and Christians.* Sementara itu Ger Kristen Anglikan juga mulai memasukka diskusi tentang dialog antaragama dala *Lambeth Conference Resolution* (Resolusi Konferensi Lambeth) pada 1968. Jika dal pertemuan-pertemuan sebelumnya reso tentang dialog antarumat agama.

Dari pihak Islam upaya dialog antaruma internasional dapat dilihat misalnya dar inisiatif yang dilakukan oleh Rabitat al-'Alam al-Islami (Muslim World League), yang didirikan di Makkah pada 1962 dan memiliki sekitar 60 anggota dari berbagai dunia. Organisasi ini berdiri atas dasar anggapan bahwa banyak terjadi kesalahpahaman tentang Islam, terutama oleh nonmuslim, dan karena itu bertujuan untuk memberi penjelasan tentang Islam kepada umat beragama lain sehingga kesalahpahaman tersebut

dapat diminimalisasi. Program yang dilakukannya termasuk mempublikasikan berbagai buku tentang Islam. Institusi dari pihak Islam lainnya yang mengusahakan dialog antarumat adalah Jam'iyya al-Da 'wa al-Islamiyya al-'Alamiyyah (*The World Islamic Call Society*) yang telah membahas isu tentang hubungan Islam-Kristen. Organisasi ini dibentuk di Libya pada 1972, dengan tujuan untuk melakukan berbagai kegiatan keagamaan, budaya, dan bidang sosial serta pendidikan. Jam 'iyya memiliki hubungan dengan berbagai institusi Kristen seperti Vatikan dan PCID. Hal tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa dialog adalah cara yang paling tepat untuk memahami satu sama lain dalam rangka menciptakan perdamIqbaln, persaudaraan sesama manusia, membangun peradaban, dan menghindari peperangan.

Institusi internasional lain yang juga didirikan untuk menjalin dialog antarumat adalah *The World Conference on Religion and Peace* (WCRP) yng didirikan pada 1970 di Kyoto, Jepang, untuk mengaktualkan potensi dalam rangka melakukan aksi bersama. Lebih dari 10.000 pemuka agama dari berbagai negara berkumpul dan menegaskan perlunya aksi bersama untuk menciptakan perdamaian. Isu-isu yang menjadi perhatian WCRP termasuk transformasi konflik, hak anak, isu tentang keamanan dan perdamaian, dan hak asasi manusia, yang kemudian diwujudkan dalam berbagai aktivitas terkait. Dalam lingkup regional, WCRP juga memiliki hubungan erat dengan berbagai institusi sejenis, termasuk *Asian Conference on Religion and Peace* (ACRP) dan *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP).

Dialog antarumat dirasakan penting karena di Indonesia rentan terjadi peristiwa kekerasan berlatar agama di berbagai wilayah. Meski secara umum hubungan antar umat beragama di Indonesia dalam kesehariannya hidup rukun dan damai tetapi potensi untuk

Kerukunan umat beragama.
Sumber foto: www.rudihartono.id

terjadi konflik masih terbu...
Makassar yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 1967 dapat dilihat sebagai peristiwa penting yang menandai dimulainya dialog resmi antarumat beragama.

Akibat peristiwa itu Komite Aksi Mahasiswa Indonesia/KAMI mengirim surat terbuka kepada Pejabat Presiden Suharto agar menghentikan konflik tersebut dengan cara membentuk sebuah lembaga konsultasi untuk mendiskusikan toleransi antarumat beragama. Selain itu, Mar'ie Muhammad, Ketua KAMI saat itu juga meminta pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur peliputan pers atas peristiwa konflik.

Dalam konteks peristiwa yang dilatari isu penyebaran agama inilah Musyawarah Antaragama kemudian dilaksanakan di Jakarta pada 30 November 1967 atas prakarsa pemerintah. Pertemuan tersebut

...

Dachlan, dan dihadiri oleh sekitar 20 tokoh Muslim, Protestan, dan Katolik. Sejak itulah pemerintah, melalui Kementerian Agama, memperkenalkan peraturan tambahan mengenai hubungan antarumat beragama. Pada 1969, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri menandatangani Surat Keputusan Bersama (No. 01/BER/MDN-MAG/1969) mengenai pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh para pemeluknya. Peraturan tersebut antara lain didasari pemikiran bahwa pemerintah perlu menjaga kebebasan setiap warga untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Hal penting dalam peraturan tersebut adalah bahwa kepala daerah bertugas memonitor propaganda dan ibadah para pemeluk agama sehingga

Dialog antar umat beragama.
Sumber foto: www.jatimtimes.com

tidak terjadi konflik. Selain itu, kegiatan tersebut tidak boleh mengandung unsur intimidasi, penyuapan, pemaksaan, atau ancaman, dan tidak boleh mengganggu keamanan umum. SKB tersebut juga menegaskan bahwa pembangunan rumah ibadah apa pun harus mendapatkan izin dari gubernur provinsi atau pihak lain yang ditunjuk untuk mengatur masalah tersebut. Model dialog seperti di atas yang berdasar pada asumsi bahwa upaya hubungan antarumat beragama hanya menjadi tanggung jawab para pemuka agama, dan bahwa upaya tersebut menekankan pada menjaga populasi jumlah pemeluk agama, telah menempatkan dialog pada komunikasi yang tidak produktif. Hal itu disebabkan karena isu agama hanya direduksi menjadi isu penyebaran agama sedangkan hubungan harmonis yang dipromosikan oleh pemerintah hanya dipahami sebagai tidak adanya konflik, bukan sebagai tanggung jawab bersama.

Meski gagal di pertemuan awal, Menteri Agama K.H.M Dachlan dan penggantinya terus mengupayakan pertemuan tokoh-tokoh agama, konsultasi, dan upaya lainnya. Konsep tersebut menjadi jelas dalam istilah yang digunakan oleh Menteri Agama berikutnya Mukti Ali (1971-1978), yaitu *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan). Rintisan Mukti Ali tersebut sangat terkait dengan usaha Orde Baru dalam percepatan stabilitas sosial untuk pembangunan nasional. Melalui konsep tersebut, pemerintah menginginkan masyarakat melupakan perbedaan dan lebih berfokus kepada kepentingan bersama, yakni pembangunan.

Pada level wacana, konsep *agree in disagreement* Mukti Ali ini mungkin memang hanya dipahami kalangan masyarakat di tingkat tertentu, tetapi melalui berbagai aktivitas kerukunan

hidup beragama, dia mencoba menawarkan beberapa langkah praktis. Sebagai contoh pada 1977, Kementerian Agama mengadakan Program Kerjasama Sosial Kemasyarakatan dalam bentuk *camping* di Jakarta dan Medan. Pesertanya adalah wakil mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Teologi, dan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara yang terlibat dalam diskusi mengenai isu-isu keagamaan yang dilanjutkan dengan program sosial untuk membantu masyarakat sekitarnya. Selain itu, pada 1972-1977, Kementerian Agama juga menyelenggarakan 23 pertemuan dialog antaragama yang berlangsung di 21 wilayah Indonesia yang melibatkan berbagai pemuka agama, pemerintah, dan kepercayaan lokal, serta mengadakan program latihan penelitian agama yang menghadirkan orang dari berbagai latar agama dalam satu forum selama 3 bulan. Namun program-program tersebut tidak lepas dari kritik, karena hasil akhir dan tindak lanjutnya kurang. Mukti Ali sendiri pun mengakui bahwa dialog antarumat beragama yang dijalankan oleh para pengajar lebih membuahkan hasil daripada yang dijalankan secara formal oleh pemerintahan.

Pada masa awal Orde Baru, pemerintah menciptakan sebuah sistem yang memungkinkan mereka untuk secara lebih mudah mengetahui suara resmi masyarakat agama melalui wadah-wadah perwakilan keagamaan yang ada, seperti MUI, KWI, dan PGI. Pada masa mentri agama berikutnya Alamsyah Prawiranegara, Wadah Musyawarah Antar-Umat Beragama, yang pertama kali diusulkan pada 1967, dibentuk pada 1980 melalui SK No. 35/1980. Wadah tersebut terdiri dari para pemimpin organisasi keagamaan (MUI, MAWI, DGI, Walubi dan PHDI) yang kemudian menyetujui untuk menandatangani pedoman dasar bagi hubungan antarumat beragama.

Model dialog antaragama secara luas sebagaimana diungkapkan di atas, juga berlangsung di dunia akademik perguruan tinggi. Sebagai contoh adalah terbentuknya *Indonesian Consortium of Religious Studies* (ICRS), yang merupakan konsorsium tiga universitas di Yogyakarta yang berbeda afiliasi keagamaannya: Universitas Gadjah Mada, sebuah universitas umum negeri yang tidak memiliki afiliasi keagamaan, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), dan Universitas Negeri Islam (UIN) Sunan Kalijaga.

Di UIN sebagai perguruan tinggi dengan fokus pada studi tentang agama, dialog antarumat diwujudkan dalam bentuk pendirian jurusan perbandingan agama. Seiring dengan transformasi dari IAIN ke UIN Jurusan Perbandingan Agama (PA) kini sedang mempertimbangkan untuk mengubah orientasi studi agamanya, bahkan mengubah namanya, untuk mencerminkan perkembangan-perkembangan baru dalam bidang studi agama yang akan memperlakukan agama-agama non-Islam secara lebih empati, tidak menghakimi dari perspektif sendiri, dan lebih mengembangkan topik-

Toleransi umat muslim kota Belitung. Sumber foto: www.sewor.com

Dialog antar agama di Bali. Sumber foto: www.kabarnusa.com
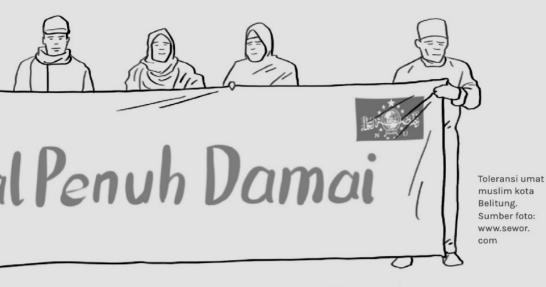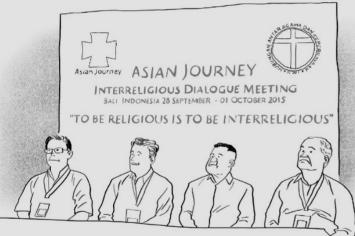
topik menyangkut agama dan isu-isu kontemporer. Selain di program studi, perkembangan menyangkut dialog dapat dilihat di pusat-pusat studi. Sebagai contoh, di UIN Yogyakarta saat ini terdapat *Dialogue Centre* (DC), yang berdiri pada Oktober 2004. DC terutama berorientasi pada pengembangan wawasan dialog di kalangan kaum muda, untuk mengimbangi fokus dialog yang selama ini lebih diarahkan pada tokoh-tokoh (atau elite) agama. Atas dasar keyakinan bahwa dialog adalah proses belajar.

Sementara itu di Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW, Yogyakarta) muncul Program Studi Agama-agama (PSAA), yang bukan suatu program akademik formal, tapi lebih merupakan upaya pembinaan terhadap warga gereja mengenai Islam. Dalam program yang telah diakui Departemen Pendidikan Nasional itu, pendeta Kristen dan peserta Muslim dari pesantren bersama-sama mempelajari masalah konflik dan perdamaian. Sebagai contoh, dalam penanganan pascabencana gempa Yogya Mei 2006, Pusat Studi tersebut melibatkan kelompok-kelompok Muslim yang dianggap konservatif, yang relatif jarang terlibat dalam dialog-dialog antar agama, untuk bersama-sama menangani komunitas korban gempa berlatar belakang Muslim.

PENUTUP
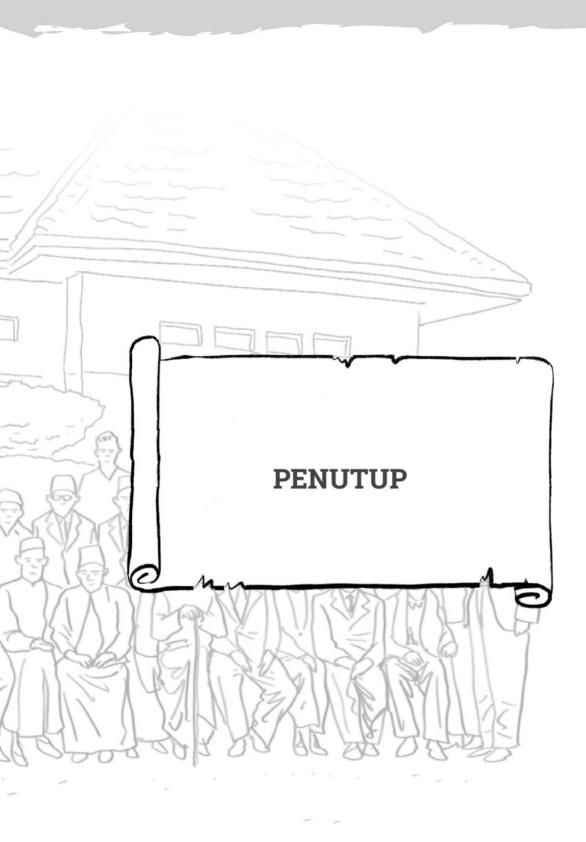
Hubungan antara Islam dan konsep kebangsaan di Indonesia seperti yang dapat dilihat dalam pembahasan buku ini memiliki pasang surut. Kerap kali terjadi tarik-menarik arah konsep kebangsaan yang dikehendaki oleh aktivis politik Islam yang berbeda dengan konsep kebangsaan yang dibayangkan oleh kelompok Nasionalis. Meski demikian, kita tidak dapat membantah bahwa sejak awal konsep kebangsaan yang menjadi ciri dan bentuk Indonesia banyak ditentukan oleh inisiatif dan kerelaan aktivis politik Muslim untuk berkompromi demi tercapainya cita-cita luhur terwujudnya bangsa Indonesia. Namun, kita juga tidak dapat mengesampingkan bahwa perjalanan mewujudkan cita-cita tersebut seringkali diwarnai dengan dinamika yang berakibat pada perdebatan dan ketegangan politik yang terus terjadi bahkan hingga saat ini.

Dalam dinamika tersebut kita dapat melihat bahwa perjalanan sejarah ke arah terwujudnya konsep kebangsaan Indonesia, tidak dapat semata-mata dilihat sebagai pertarungan agenda antara kelompok Nasionalis dan kelompok Islam. Nyatanya apa yang menjadi agenda kelompok politik Muslim dan kelompok Nasionalis adalah sebuah agenda yang cair. Seringkali di balik ketegangan politik kita melihat bagaimana sikap-sikap kenegarawanan dan visioner justru dihadirkan oleh para tokoh dari kedua kelompok sebagai sebuah jalan tengah. Hal ini misalnya dapat dilihat dari bagaimana seluruh pihak sepakat untuk menerima Pancasila sebagai jalan tengah yang mampu diterima, khususnya oleh kekuatan politik Muslim. Pun ketika arah dinamika politik Indonesia membuat tantangan demi tantangan muncul dan mengancam konsep kebangsaan Indonesia, komunitas politik Muslim mampu memberikan respons yang tetap memprioritaskan keutuhan dan kesatuan Indonesia. Tentunya semua ini tidak dapat hadir jika sejak awal kekuatan politik Islam maupun tokoh-tokoh nasional berlatar belakang Islam tidak berkomitmen dengan konsep kebangsaan Indonesia. Justru dengan melihat bagaimana respons dan sikap kompromi mereka ketika terjadi ketegangan politik menunjukan bagaimana nilai-nilai Islam yang mereka yakini menjadi panduan mereka untuk membuat keputusan yang bijaksana.

Kita harus menyadari bahwa Islam sebagai kekuatan mayoritas di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam dinamika politik. Cita-cita bangsa Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur yang dapat mengayomi seluruh rakyatnya tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, hanya dapat diwujudkan jika nilai-nilai Islam diaplikasikan dengan sikap sebagai rahmatan lil alamin, sehingga mampu membawa berkah bukan saja untuk Indonesia tetapi juga untuk dunia. Sebagai sebuah bangsa yang terus memperjuangkan konsep kebangsaannya, diharapkan kita dapat terus belajar dari catatan-catatan sejarah yang ada, khususnya yang terkait dengan Islam dan kebangsaan. Sebagai generasi muda diharapkan kita semua dapat mengambil hikmahnya. Bahwa di dalam sebuah peristiwa sejarah selalu ada sisi-sisi lain yang patut dipahami guna mendapatkan sebuah gambaran yang lengkap tentang bagaimana sebuah peristiwa sejarah dapat terjadi. Juga bahwa sebuah kejadian sejarah bukanlah sebuah gambaran hitam putih yang tegas melainkan lebih menyerupai gambaran yang kompleks dengan berbagai nuansa abu-abunya.

NAH..BEGITULAH PERAN ORMAS KEAGAMAAN, KHUSUSNYA ISLAM DALAM MEMBANGUN KEBANGSAAN. JADI, SEJAK AWAL, GAGASAN KEBANGSAAN INDONESIA JUSTRU DIPELOPORI OLEH ORMAS ISLAM. BAHKAN HINGGA SEKARANG ORMAS ISLAM TERUS MEMELIHARA DAN MENJAGA KEBANGSAAN INDONESIA TETAP LESTARI.
KAKAK RASA DISKUSI KITA CUKUP SEKIAN DULU YA. JIKA ADA WAKTU, KAKAK AKAN SAMBUNG DENGAN TOPIK LAIN. SEKARANG KAKAK MAU ISTIRAHAT DULU KARENA HARI SUDAH LARUT DAN KAKA SUDAH NGANTUK..

RUJUKAN

Banawiratma, JB Zainal Abidin Bagir. 2010. *Dialog Antar Umat Beragama Gagasan dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Mizan Publika.

Burhanudin, Jajat. 2017. *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Febriansyah, M. Raihan, dkk. 2013. *100 Tahun Muhammadiyah Menyinari Negeri*. Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Kersten, Carool. 2018. *Mengislamkan Indonesia Sejarah Peradaban Islam di Nusantara*. Tangerang: Penerbit Baca.

__________, 2015. *Islam in Indonesia The Contest for Society, Ideas, and Values*. New York : Oxford University Press.

Mafaz, Salamun Ali. 2011. "Memaknai Hari Raya dalam Tradisi Agama." *Majalah Bhinneka Edisi* 6 Maret 2011.

Ropi, Ismatu. 2017. *Relegion and Regulation in Indonesia*. Singapore: Palgrave Mcmillan.

Ruhana, Akmal Salim. 2010. "Peran dan Hubungan LSM dan Pemerintah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia." *Jurnal Multikultural & Multirelegius Harmoni Volume* IX No 34, April Juni 2010.

Zainuddin, dkk. 2015. *Revitalisasi Kearifan Lokal Untuk Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: Dialog Centre Press.

Sumber lain :

http://www.nu.or.id

http://www.muhammadiyah.or.id

http://www.persis.or.id

https://tirto.id

https://historia.id

INDEKS

BIODATA

Yudi Amboro

Menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dari Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta (IKJ) pada tahun 2001 dan kemudian memperoleh Master (S2) dari Seni Urban dan Industri Budaya di Sekolah Pascasarjana IKJ pada tahun 2011. Sejak 1998 menjadi staf pengajar di Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa IKJ. Saat ini selain aktif menjadi desainer dan konsultan desain di bidang multimedia, tercatat sebagai anggota ADGI dan ICO-D, juga narasumber bidang dkv dan multimedia di lembaga pemerintah. Tahun 2011 ikut menjadi Instruktur Pelatihan Publikasi Museum Alquran Departemen Agama di TMII. Kemudian menjadi panitia workshop komik Perancis Muslim Show oleh penerbit Mizan di IKJ, tahun 2014. Kemudian menjadi periset untuk Buku Sejarah SMP Direktorat Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.

Kendra Hanif Paramita

Lahir Jakarta, Februari 1980, Kendra Paramita adalah seorang desainer dan ilustrator senior Majalah Tempo sejak 2004 silam. Ia bekerja selepas menyelesaikan studinya di Institut Kesenian Jakarta. Setahun kemudian ia langsung dipercaya untuk menangani sampul depan Majalah Berita Mingguan Tempo. Ilustrasinya untuk Tempo edisi "Sengkarut Jembatan Selat Sunda" yang dirilis Agustus 2012 dan "Investigasi Sindikat Manusia Perahu" yang rilis Juni 2012, berhasil meraih penghargaan untuk sampul Majalah Terbaik se-Asia versi World Association of Newspaper and News Publisher (WAN-IFRA) di tahun 2013.

Carolline Mellanie

Lahir di Jakarta, Juli 1986, Mellanie menyelesaikan pendidikan sarjana di Jurusan Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa IKJ pada tahun 2008, Mellanie memulai kariernya sebagai desainer grafis dan ilustrator. Semasa akhir perkuliahan, Mellanie bekerja sebagai ilustrator lepas untuk buku cerita dan majalah anak. Pada tahun 2009–2014, bekerja di beberapa perusahaan nasional di bidang desain. Selain berkarya sebagai desainer grafis, sekarang ini Mellanie mengajar desain di Fakultas Seni Rupa IKJ (Institut Kesenian Jakarta) dan sedang menyelesaikan pendidikan Pascasarjana di Program Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta.

Adityayoga

Adityayoga lahir di Jakarta bulan April 1980, menyelesaikan kuliah desain grafis di IKJ pada tahun 2003, memulai kariernya sebagai desainer grafis dan fotografer lepas. Pada tahun 2004–2008, bekerja di beberapa biro desain seperti Greenlab dan DesignLab, pengembangan branding, desain identitas, desain kemasan menjadi konsentrasinya. Selain berprofesi sebagai desainer grafis, Adityayoga juga aktif mengajar di Fakultas Senirupa IKJ (Institut Kesenian Jakarta), Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) dan Universitas Indonesia.

Islam, Dialog Toleransi, Kebangsaan

Peran Islam sebagai kekuatan yang menjadi katalisator dan dinamisator gerakan kebangsaan di Indonesia tidaklah dapat diragukan lagi. Sejak awal ketika konsep tersebut masih merupakan gagasan hingga ke masa sekarang ketika cita-cita kebangsaan kerap dipertanyakan, Islam masih setia untuk merawat konsep tersebut sehingga tetap lestari hingga kini.

Buku ini mencoba menambahkan apa yang selama ini telah diketahui secara umum melalui tambahan-tambahan pembahasan, khususnya untuk tingkat SMA sehingga materi sejarah yang diterima sebagai materi utama menjadi lebih lengkap untuk dipelajari sehingga siswa-siswi diharapkan semakin menyadari peran dan fungsi penting Islam sebagai penggagas dan perawat konsep kebangsaan Indonesia.

TUT WURI HANDAYANI

DIREKTORAT SEJARAH
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2018

9 786021 289877